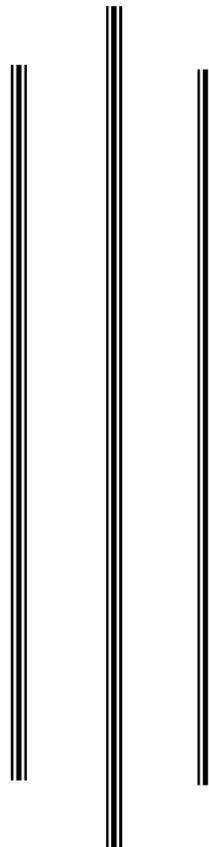




REVISI II RENSTRA
(RENCANA STRATEGIS)
TAHUN 2011-2016



DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
KABUPATEN JEMBRANA

Tahun 2013



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
Jalan Surapati Nomor 1 Telp. (0365) 41210 Negara

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN JEMBRANA

Nomor : 22.a/HUBKOMINFO/2013

TENTANG
PERUBAHAN II RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN
JEMBRANA TAHUN 2011 – 2016

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas KKN dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan pembrantasan Korupsi, Undang undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, Undang undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri No. 13 tahun 2006, dipandang perlu untuk menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jemberana tentang Perencanaan Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jemberana Tahun 2011-2016.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Jembrana Nomor 3); sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PERUBAHAN II RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENSTRA SKPD) DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2011–2016.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana Tahun 2011–2016 yang selanjutnya disebut dengan RENSTRA Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana adalah Dokumen Perencanaan tentang rencana strategis kinerja dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Jembrana sebagaimana diamanatkan oleh Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pembrantasan Korupsi.
2. RENSTRA Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana Tahun 2011–2016 adalah rencana strategis lima tahunan tentang rencana kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana sebagai penjabaran pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2011 – 2016 serta Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor 1174 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 - 2016
3. RENSTRA Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana Tahun 2011–2016 memuat Visi, Misi, Tujuan Sasaran, Kebijakan Program, dan kegiatan serta cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Perubahan RENSTRA Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2011 – 2016 adalah perubahan atas RENSTRA yang terjadi karena adanya Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 yang menyebabkan adanya perubahan pada Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) serta pada perubahan

kedua dikarenakan penambahan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan strategis untuk periode sampai dengan tahun 2016.

Pasal 2

RENSTRA SKPD Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana menunjukkan arah pembangunan di bidang Informasi Komunikasi dan Perhubungan pelaksanaan pembangunan yang bersifat strategis pada tahun 2011–2016 sebagaimana telah diubah dalam Perubahan RENSTRA SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana Tahun 2011 – 2016.

Pasal 3

RENSTRA SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana sebagaimana telah mengalami perubahan RENSTRA Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika merupakan:

- a. Acuan dalam menyusun program dan rencana kerja pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana Tahun 2011–2016
- b. Program kerja yang berkesinambungan berbasis kinerja bagi Bidang dan Sekretaris, maupun staf dalam menyusun rencana kegiatan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana.

Pasal 4

Bidang dan Sekretaris maupun staf menyusun rencana, program dan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dengan berpedoman pada RENSTRA SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana yang telah ditetapkan sehingga arah dan tujuan yang dicapai dalam tahun 2011–2016 tercapai.

Pasal 5

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana melakukan pemantauan dan menganalisis program dan rencana kerja masing masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Pasal 6

Perubahan RENSTRA SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana Tahun 2011–2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Negara
Pada tanggal : 5 Juni 2013



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sanghyang Widhi Wasa, Perubahan Renstra (Rencana Strategis) Tahun 2011 – 2016 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana telah selesai disusun.

Penyusunan perubahan pertama rencana strategis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2011-2016 terjadi karena mengacu kepada tugas pokok dan fungsi baru akibat adanya perubahan tupoksi pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana yang tertuang secara rinci pada Peraturan Bupati Jembrana Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana, dengan memperhatikan faktor pendukung dan penghambat yang ada, yang merupakan hasil analisis eksternal dan internal, maupun dari masukan para *stake holders*. Sedangkan pada perubahan kedua rencana strategis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2011-2016 terjadi karena penambahan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan yang sangat strategis untuk periode tahun 2011-2016.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Hubkominfo Tahun 2011-2016 memuat secara keseluruhan kebijakan publik di lingkungan Dinas Hubkominfo dan secara khusus membahas kebijakan publik sektor perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun berdasarkan kebutuhan dan telah menyesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016, dan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja SKPD.

Dengan adanya dokumen perencanaan strategis tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran dan arahan yang jelas bagi keberlangsungan Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana, selain sebagai pengukur kinerja untuk mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah.

Tentu masih banyak kekurangan dalam penyusunan Perubahan Renstra tersebut, sehingga masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan untuk perbaikan di kemudian hari.

Kami sadari begitu banyak pihak yang telah membantu terselesainya Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016, untuk itu Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga Ida Sanghyang Widhi Wasa memberkati kita semua.

Negara, 5 Juni 2013



D A F T A R I S I

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR BAGAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan.....	10
1.3.1 Maksud Penyusunan Renstra.....	10
1.3.2 Tujuan Penyusunan Renstra	11
1.4 Sistematika Penulisan Renstra	11
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN	
 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	16
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	16
2.2 Sumber Daya	25
2.3 Kinerja Pelayanan Organisasi	26
2.4 Tantangan dan Peluang	35
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	39
3.1 Identifikasi Permasalahan	39
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Pemkab Jembrana	44
3.3 Telaahan Renstra K/L	47
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	50

3.5	Isu Strategis	52
BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	59
4.1	Visi dan Misi SKPD	59
4.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	61
4.3	Strategi dan Kebijakan	64
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	65
5.1	Rencana Program Prioritas	65
BAB VI	INDIKATOR KINERJA	105
6.1	Indikator Kinerja.....	105
BAB VII	P E N U T U P	115
LAMPIRAN – LAMPIRAN		

D A F T A R T A B E L

TABEL 2.1	DATA PEGAWAI MENURUT GOLONGAN	25
TABEL 2.2	DATA PEGAWAI MENURUT ESELON	26
TABEL 2.3	DATA ASET YANG DIMILIKI	26
TABEL 2.4	PROGRAM PRIORITAS YANG DILAKSANAKAN TAHUN 2009 DAN 2010	27
TABEL 2.5	DATA PEMANFAATAN TIK	28
TABEL 2.6	DATA PENYEBARLUASAN/SOSIALISASI INFORMASI PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2010	29
TABEL 2.7	PERSENTASE PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.....	30
TABEL 2.8	DATA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA	31
TABEL 2.9	DATA REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2009 DAN TAHUN 2010	31
TABEL 2.10	PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEMBRANA PROVINSI BALI	33
TABEL 2.11	ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEMBRANA PROVINSI BALI	34
TABEL 4.1	TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN	63
TABEL 5.1	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEMBRANA	87

TABEL 6.1	INDIKATOR KINERJA SKPD MENGACU TUJUAN DAN SASARAN	
	RPJMD	100
TABEL 6.2	TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN	103

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 3.1 KARPET MERAH DI SURAKARTA	55
GAMBAR 3.2 RAMBU ZOSS DI CALIFORNIA	55

DAFTAR BAGAN

BAGAN I.I	HUBUNGAN RENSTRA SKPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA.....	5
BAGAN 1.2	TAHAPAN PENYUSUNAN RENSTRA SKPD	6
BAGAN 2.1	STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	18
BAGAN 2.2	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2009 S/D TAHUN 2010	28
BAGAN 2.3	REALISASI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.....	30

B A B I

P E N D A H U L U A N

1.1 LATAR BELAKANG

Kata ‘rencana’ sering kali kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, baik di dunia pendidikan maupun di dunia kerja. Rencana merupakan hasil dari proses perencanaan berupa daftar ketetapan tentang langkah tindakan pada masa depan menyangkut kegiatan apa, siapa yang melaksanakan, dimana pelaksanaannya, kapan dilaksanakan dan sumberdaya apa yang digunakan, serta berbagai pertimbangan tolok ukur dalam pencapaian hasil (wikipedia). Jadi rencana merupakan inti dari proses awal yang sangat signifikan yaitu perencanaan, bahkan kalau kita mengetik kata ‘perencanaan’ pada mesin pencari *google*, maka akan terlihat banyak sekali hal yang mencantumkan kata ‘perencanaan’: perencanaan wilayah, perencanaan keuangan, perencanaan pembangunan, dan masih banyak lagi. Dalam ilmu manajemen, ‘perencanaan’ diartikan sebagai proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain –pengorganisasian, pengarahan dan pengontrolan– tak akan dapat berjalan.

Begitu pentingnya perencanaan sehingga Alan Lakein –penulis *How to Get Control of Your Time and Your Life*– menyatakan : gagal merencanakan berarti merencanakan kegagalan (*fail to plan is planning to fail*). Masih mengutip pernyataan Alan Lakein, perencanaan akan menjadi efektif jika kita menghadirkan kebutuhan masa depan di keadaan sekarang, sehingga kita bisa menghitungnya dengan jelas

(Planning is bringing the future into the present so that you can do something about it now).

Stephen Robbins dan Mary Coulter mengemukakan empat tujuan perencanaan :

1. Untuk memberikan arahan baik untuk manajer maupun karyawan nonmanajerial;
2. Untuk mengurangi ketidakpastian;
3. Untuk meminimalisir pemborosan;
4. Untuk menetapkan tujuan dan standard yang digunakan dalam fungsi selanjutnya, yaitu pengontrolan dan pengevaluasian.

Namun sering kali ‘perencanaan’ dipandang sebelah mata, terutama dalam proses pemerintahan. ‘Perencanaan’ pada awalnya hanya melekat pada manajemen bisnis, dan sering kali ‘perencanaan’ selalu mengikuti kegiatan manajemen bisnis. Namun seiring dengan berkembangnya birokrasi, berkembangnya proses penegakan hukum, dan kebutuhan akan akuntabilitas instansi publik, ‘perencanaan’ mulai menjadi bagian terpenting dalam birokrasi, sesuai dengan ruh reformasi birokrasi, yang pada dasarnya menghendaki adanya perbaikan yang signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut menyangkut proses awal perencanaan, pelaksanaan dan pengevaluasian, dengan memperhatikan prinsip-prinsip *Good Governance* (Partisipasi, Penegakan Hukum, Transparansi, Kesetaraan, Daya Tanggap, Wawasan Kedepan, Akuntabilitas, Pengawasan, Efisiensi dan Efektifitas, dan Profesionalisme), sebagai indikator yang dianggap cukup representatif terhadap tuntutan perbaikan birokrasi.

Perencanaan terdiri atas dua elemen penting, yaitu sasaran (*goals*) dan rencana itu sendiri (*plan*). Dalam menetapkan sasaran, masyarakat sebagai *stake holder* diharapkan menjadi pemain utama. Partisipasi masyarakat, dan kemampuan untuk menangkap dan menterjemahkan tuntutan publik menjadi faktor penting dalam proses perencanaan.

Perencanaan sebagai pedoman kegiatan pemerintahan, atau lebih dikenal dengan Perencanaan Strategis (renstra), merupakan suatu proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi tersebut (*Wikipedia,2010*). Perencanaan strategis SKPD merupakan ikhtisar dari arahan pembangunan daerah, yang lebih memfokuskan kegiatan pada bidang-bidang tertentu sesuai amanat otonomi daerah. Dalam hal ini, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika memiliki 2 (dua) urusan otonomi daerah yaitu urusan perhubungan dan urusan komunikasi informatika.

Penyusunan rencana strategis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2011-2016, mengacu kepada tugas pokok dan fungsi yang tertuang secara rinci pada Peraturan Bupati Jembrana Nomor 29 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana, dengan memperhatikan faktor pendukung dan penghambat yang ada, yang merupakan hasil analisis eksternal dan internal, maupun masukan para *stake holders*. Namun, seiring dengan kebutuhan untuk dapat menyelenggarakan seluruh urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi urusan Pemerintahan Kabupaten Jembrana serta tugas-tugas yang merupakan perbantuan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi, maka dipandang perlu adanya perubahan pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Jembrana sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Jembrana Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana.

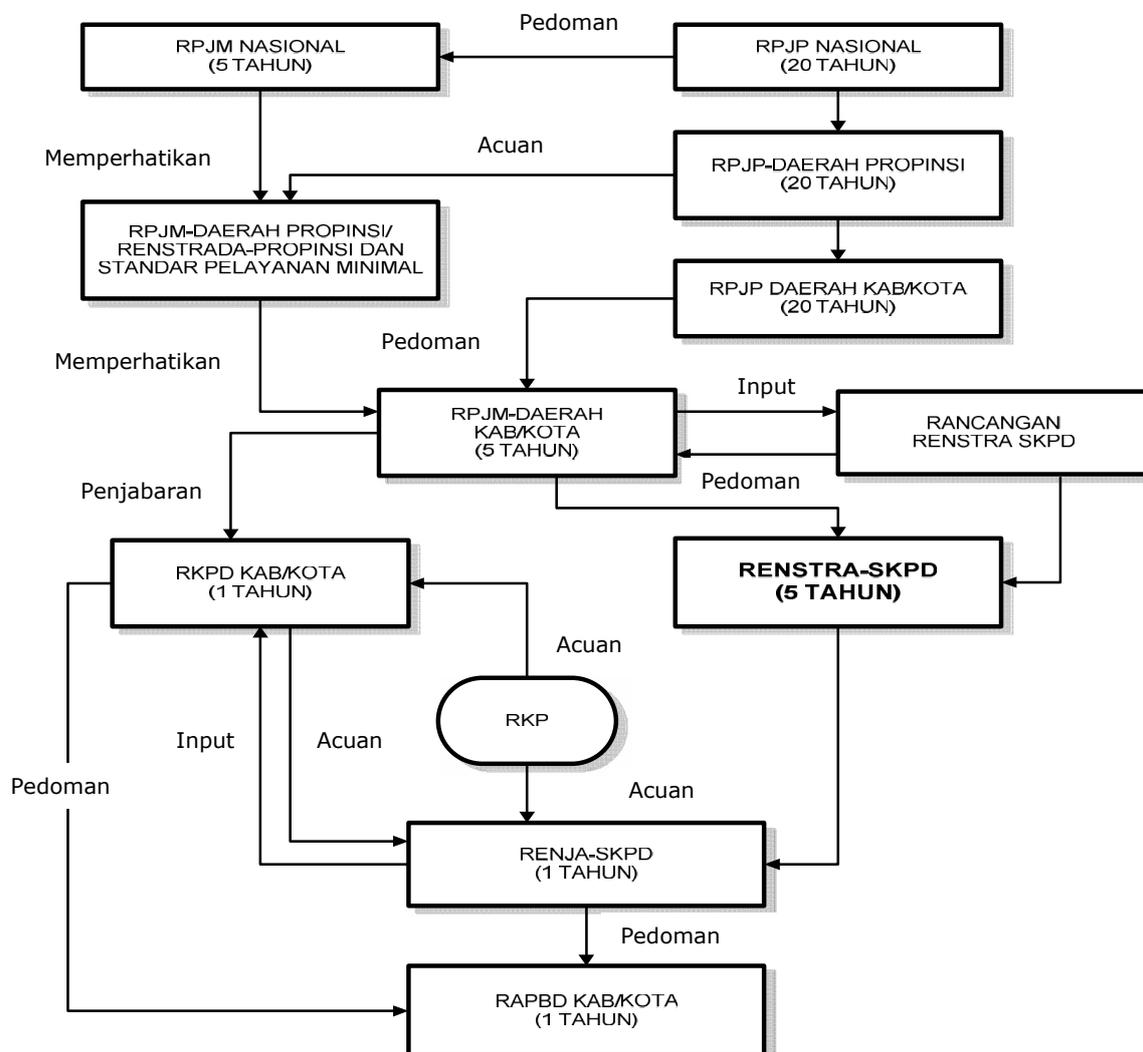
Perubahan Rencana Strategis Dinas Hubkominfo Tahun 2011-2016 yang dilatarbelakangi karena adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja pada Dinas

Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana memuat secara keseluruhan kebijakan publik di lingkungan Dinas Hubkominfo dan secara khusus membahas kebijakan publik sektor perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun berdasarkan kebutuhan dan telah menyesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016, dan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja SKPD.

Pada perubahan Renstra yang kedua ini, disesuaikan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan nanti untuk periode tahun 2011-2016 sehingga terdapat kesesuaian antara rencana jangka menengah, jangka pendek serta rencana kerja tahunannya yang tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Adapun hubungan Renstra SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada bagan 1.1 berikut ini :

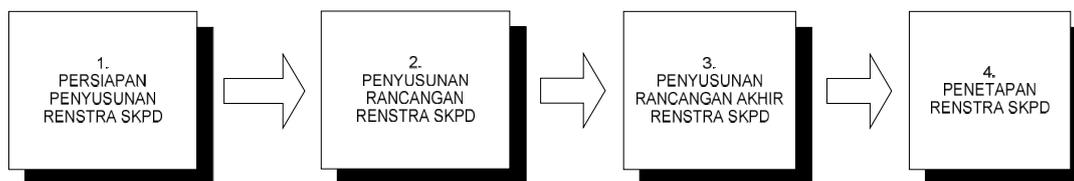
BAGAN 1.1
HUBUNGAN RENSTRA SKPD DENGAN
DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA



Pada Bagan 1.1 di atas terlihat bahwa Renstra SKPD merupakan perencanaan strategis jangka menengah (5 tahun), yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten, dan merupakan acuan bagi penyusunan Renja (rencana kerja SKPD) untuk kemudian dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran, sebagai pedoman penyusunan APBD.

BAGAN 1.2

TAHAPAN PENYUSUNAN RENSTRA SKPD



Sumber : Kementerian Dalam Negeri, Tahun 2011

Pada Bagan 1.2 di atas terlihat bahwa ada empat tahapan utama dalam penyusunan Renstra SKPD. Tahap pertama yaitu persiapan penyusunan Renstra SKPD. Dalam tahap ini, SKPD menganalisis pelaksanaan Renstra SKPD sebelumnya untuk mengetahui hambatan dan kendala, serta menganalisa isu-isu strategis yang terkait dalam tugas pokok dan fungsi SKPD.

Tahap kedua merupakan penyusunan rancangan Renstra SKPD, yaitu menentukan program dan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan selama kurun waktu lima tahun.

Tahap ketiga ada penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD yang merupakan penyempurnaan rancangan Renstra SKPD dan berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Tahap keempat merupakan penetapan Renstra SKPD oleh kepala SKPD yang dilakukan setelah pengesahan rancangan akhir Renstra SKPD menjadi Renstra SKPD oleh Keputusan Kepala Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Renstra SKPD Dinas Hubkominfo Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016 adalah merupakan dokumen perencanaan strategi yang disusun berdasarkan beberapa landasan, yaitu mengacu pada :

- (1) Landasan Idiil yaitu Pancasila
- (2) Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945
- (3) Landasan Operasional :
 - a. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - b. Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - e. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - f. Undang-undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Inodnesia Nomor 4421);

- g. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- h. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- i. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara epublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- p. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- q. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan Pemberantasan Korupsi;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tetang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

- t. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 7 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2010-2014;
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2006 tentang Rencana Program Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jembrana 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13)
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3);
- w. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 27 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana;
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 7 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana;
- y. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2011 tentang RPJMD 2011- 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud Penyusunan Renstra

Maksud dari penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupaten Jembrana Tahun 2011 - 2016 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah bagi seluruh Tingkatan Manajemen Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana dalam pelaksanaan program

untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat seiring dengan adanya struktur organisasi dan tata kerja yang baru.

2. Membangun sistem kinerja yang lebih akuntabel pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana.

1.3.2 Tujuan Penyusunan Renstra

Tujuan penyusunan Renstra pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2015 adalah:

1. Sebagai acuan dalam penyusunan RKT (Rencana Kinerja Tahunan), penganggaran dan program lainnya pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana.
2. Sebagai acuan dalam penilaian kinerja pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN RENSTRA

Sistematika Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016 terdiri atas :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses pengusunan Renstra serta keterkaitan Renstra dengan RPJMD dan dokumen perencanaan lainnya.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang,undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur

organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II PROFIL LAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEMBRANA

Pada bab ini menguraikan gambaran umum, tugas pokok dan fungsi, kelembagaan serta sumber daya manusia dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana .

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, struktur organisasi serta raian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Kepala Dinas.

2.2 Sumber Daya

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Organisasi

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya.

2.4 Tantangan dan Peluang

Bagian ini mengemukakan hasil analisis yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan alokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Pemkab Jembrana

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana yang terkait dengan visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

3.3 Telaahan Renstra K/L

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor pendorong dari pelayanan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang mempengaruhi permasalahan pelayanan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan yang nantinya akan diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra tahun rencana.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, SERTA CARA MANCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Visi dan Misi

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana.

4.3 Strategi dan Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan dalam lima tahun mendatang.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bab ini mengemukakan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VI PENETAPAN INDIKATOR KINERJA

Pada bab ini menguraikan tentang indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan program kegiatan.

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana dibentuk sebagai salah satu pelaksana kewenangan daerah otonom di Kabupaten Jembrana, dan sesuai Pasal 22 ayat (4) d. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, dan Perda Nomor 3 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Perda Nomor 15 Tahun 2011.

Secara umum Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana menangani dua urusan pemerintahan, yaitu urusan Perhubungan dan urusan Komunikasi dan Informatika, dengan 4 (empat) tugas pokok yang diselenggarakan, yaitu :

1. Pengendalian keamanan lalu lintas dan angkutan;
2. Penyediaan sarana dan prasarana perhubungan serta pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor;
3. Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi;
4. Penyebarluasan informasi bagi masyarakat.

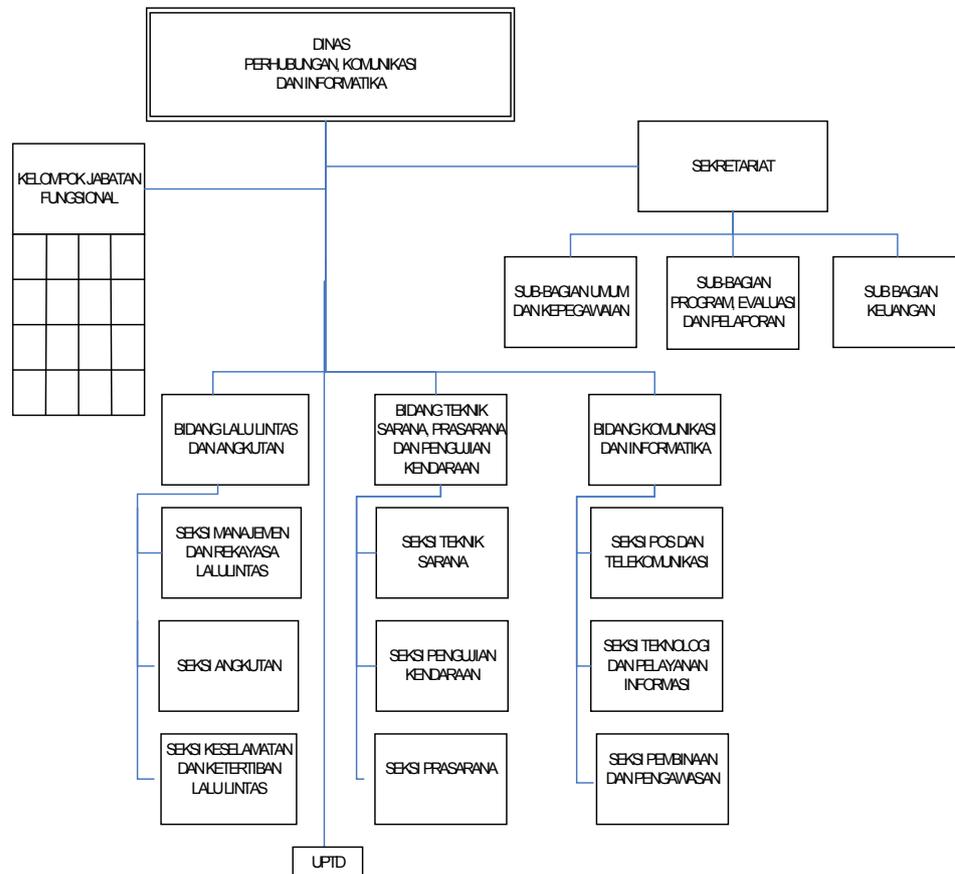
Pada Peraturan Bupati Jembrana nomor 27 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana, Dinas Hubkominfo dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang dalam mengembang tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris Dinas, dan 4 (empat) orang Kepala Bidang. Sekretaris Dinas dalam melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Sub Bagian yang masing-masing menangani masalah Kepegawaian, Keuangan,

Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan. Masing-masing Kepala Bidang membawahi 2 (dua) Kepala Seksi, yang menandai teknis kegiatan tertentu.

Namun, dikarenakan adanya perubahan dalam struktur organisasi dan tata kerja, sesuai dengan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 55 Tahun 2011, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, dalam mengemban tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris Dinas serta 3 (tiga) orang Kepala Bidang. Dalam menjalankan tugas kesekretariatan, sekretaris dinas dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian yaitu Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kepala Sub Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan serta Kepala Sub Bagian Keuangan. Sedangkan untuk masing-masing Kepala Bidang, dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi.

Untuk lebih jelasnya berikut Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika :

BAGAN 2.1
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



Sumber : Perda Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah Kabupaten Jember

Sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kepala Dinas memiliki fungsi sebagai berikut :

- perumusan kebijakan teknis dinas;
- penyusunan rencana strategik dinas;
- penyelenggaraan pelayanan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dinas;

- e. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan dinas.
- f. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Jembrana nomor 55 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, dalam menjalankan fungsinya, Kepala Dinas, memiliki rincian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan berdasarkan kebijakan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- b. merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;
- c. menyusun data/bahan untuk perencanaan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- d. menyusun perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan sosialisasi di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- e. mengkoordinasikan penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- f. mengkoordinasikan pengendalian dan evaluasi kegiatan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- g. menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan merekomendasikan kegiatan perizinan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika sesuai dengan kewenangannya;
- h. menyelenggarakan pembangunan pengoperasian terminal penumpang sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku;
- i. menetapkan kelas jalan pada jaringan jalan dan jaringan lintas angkutan skala kabupaten serta menyelenggarakan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan

- kabupaten, pengujian berkala kendaraan bermotor, penyidikan pelanggaran serta mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data tentang kecelakaan lalu lintas di wilayah kabupaten dan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor;
- j. menyelenggarakan diseminasi informasi skala kabupaten;
 - k. menyelenggarakan pengawasan / pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya kabupaten, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi pedesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya;
 - l. membina dan mengembangkan karir pegawai serta pelayanan kepada masyarakat sesuai bidang tugasnya maupun dalam rangka kepentingan Pemerintah Daerah;
 - m. membina pelaksanaan program waskat dan menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
 - n. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RKPD, KUA dan PPAS;
 - o. mengkoordinasikan penyusunan capaian kinerja Dinas dan Kabupaten;
 - p. mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi kegiatan dan serah terima kegiatan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - q. mengawasi pelaksanaan ketatausahaan, lalulintas, angkutan, komunikasi, informasi, sarana prasarana dan pengujian kendaraan dan humas;
 - r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang perhubungan, komunikasi dan informasi;
 - s. mengkoordinasikan seluruh bawahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
 - t. memonitor serta mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;

- u. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan rencana kerja, hasil yang dicapai sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
- w. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.

Uraian tugas dan kewenangan masing-masing pejabat struktural adalah sebagai berikut :

1. Sekretaris Dinas

- merencanakan operasionalisasi pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian, program dan pelaporan, serta keuangan;
- memberi tugas kepada bawahan dalam pengelolaan urusan Administrasi Umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta keuangan;
- mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan dan naskah dinas di bidang tugasnya;
- melaksanakan koordinasi dengan kepala bidang dalam melaksanakan tugas;
- melaksanakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, surat-menyurat, inventarisasi dan perlengkapan perencanaan dan pelaporan serta rumah tangga Dinas;
- menyelenggarakan perawatan/pemeliharaan perlengkapan peralatan dinas;
- merencanakan pelaksanaan pelayanan terhadap kebutuhan peralatan / perlengkapan dinas;

- melaksanakan penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas dan Penetapan Kinerja Dinas;
- menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- mengevaluasi tugas yang diberikan kepada kepala sub bagian;
- menyusun laporan hasil kegiatan;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
- melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

2. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

- menyusun rencana kerja Bidang Lalulintas dan Angkutan berdasarkan kebijakan Dinas;
- menyelenggarakan pembinaan umum Bidang Lalulintas dan Angkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- merumuskan kebijaksanaan teknis operasional bidang rekayasa lalu lintas, terminal dan parkir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- melaksanakan pembinaan, pengawasan dalam penyelenggaraan manajemen angkutan orang dan angkutan barang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bidang Lalulintas dan Angkutan, serta mencari alternatif pemecahannya;

- mengkoordinasikan Kepala Seksi agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;
- memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

3. Kepala Bidang Teknik Sarana Prasarana dan Pengujian Kendaraan

- menyusun rencana kerja Bidang Teknik Sarana, Prasarana dan Pengujian Kendaraan berdasarkan kebijakan Dinas;
- menyelenggarakan pembinaan umum Bidang Teknik Sarana, Prasarana dan Pengujian Kendaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- merumuskan kebijakan teknis sarana, dan prasarana serta pengujian kendaraan bermotor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- menyusun bimbingan dan pengendalian teknis operasional pengumpulan, pengolahan dan penyajian data di Bidang Teknik Sarana, Prasarana dan Pengujian Kendaraan;
- mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bidang Teknik Sarana, Prasarana dan Pengujian Kendaraan, serta mencari alternatif pemecahannya;
- mengkoordinasikan Kepala Seksi agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;

- memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
- melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

4. Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi

- menyusun rencana kerja Bidang Komunikasi dan Informasi berdasarkan kebijakan Dinas;
- menyusun teknis operasional pelayanan komunikasi dan informasi yang meliputi pos, sandi, telekomunikasi, teknologi informasi jaringan informasi dan pelayanan informasi;
- menyelenggarakan koordinasi dengan instansi/organisasi terkait bidang komunikasi dan informatika;
- mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bidang Komunikasi dan Informasi, serta mencari alternatif pemecahannya;
- mengkoordinasikan Kepala Seksi agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;
- memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

- melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

2.2 SUMBER DAYA

Untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di dukung oleh 107 (seratus tujuh) orang pegawai pada tahun 2010 serta sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) orang pada tahun 2012 dikarenakan penyesuaian dalam struktur organisasi, adapun gambaran data pegawai Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut:

TABEL 2.1
DATA PEGAWAI MENURUT GOLONGAN

No	Golongan	Tahun 2010	Tahun 2012	Tahun 2013
1	IV c	1 orang	-	-
2	IV b	1 orang	1 orang	1 orang
3	IV a	1 orang	2 orang	3 orang
4	III d	7 orang	7 orang	5 orang
5	III c	6 orang	5 orang	9 orang
6	III b	51 orang	34 orang	31 orang
7	III a	20 orang	12 orang	5 orang
8	II d	4 orang	-	-
9	II c	2 orang	1 orang	-
10	II b	6 orang	5 orang	6 orang
11	II a	6 orang	4 orang	4 orang
12	I d	1 orang	1 orang	-
13	I c	-	-	1 orang
14	I b	-	1 orang	-
13	I a	1 orang	-	-

Sumber : Sub. Bagian Umum Setdis, Tahun 2013

TABEL 2.2
DATA PEGAWAI MENURUT ESELON

No	Eselon	Tahun 2012	Tahun 2013
1	II b	1 orang	1 orang
2	III a	1 orang	1 orang
3	III b	3 orang	3 orang
4	IV a	12 orang	12 orang

Sumber : Sub. Bagian Umum Setdis, Tahun 2013

TABEL 2.3
DATA ASET YANG DIMILIKI

No	Uraian	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012
1	Tanah	Rp. 9.524.680.000,-	Rp.9.524.680.000,-	Rp.9.524.680.000,-
2	Peralatan dan Mesin	Rp. 12.487.164.536,-	Rp.13.680.923.506,-	Rp.11.676.365.875,-
3	Gedung dan Bangunan	Rp. 6.275.944.893,-	Rp.6.592.948.493,-	Rp.8.729.696.993,-
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp.173.335.000,-	Rp.314.070.000,-	Rp.314.070.000,-
5	Aset Tetap Lainnya	Rp. 113.992.800,-	Rp.113.992.800,-	Rp.113.992.800,-
Total		Rp. 28.575.117.229,-	Rp.30.226.614.799,-	Rp.30.358.805.668,-

Sumber : Sub. Bagian Umum Setdis, Tahun 2013

2.3 KINERJA PELAYANAN ORGANISASI

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dibentuk berdasarkan Perda 3 Tahun 2008 sebagaimana diubah menjadi Perda Nomor 15 Tahun 2011, yang sebelumnya merupakan Dinas Informasi Komunikasi, Pelayanan Umum, Perhubungan dan Data. Sehingga untuk mengukur kinerja Hubkominfo, dapat dilihat dari Tahun 2009 sampai dengan 2010.

Selama kurun waktu 2 (dua) tahun telah dilaksanakan 5 (lima) program prioritas, yaitu : Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ; Program Peningkatan Pelayanan Angkutan; Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas; Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa; Program Kerjasama dan Media Massa.

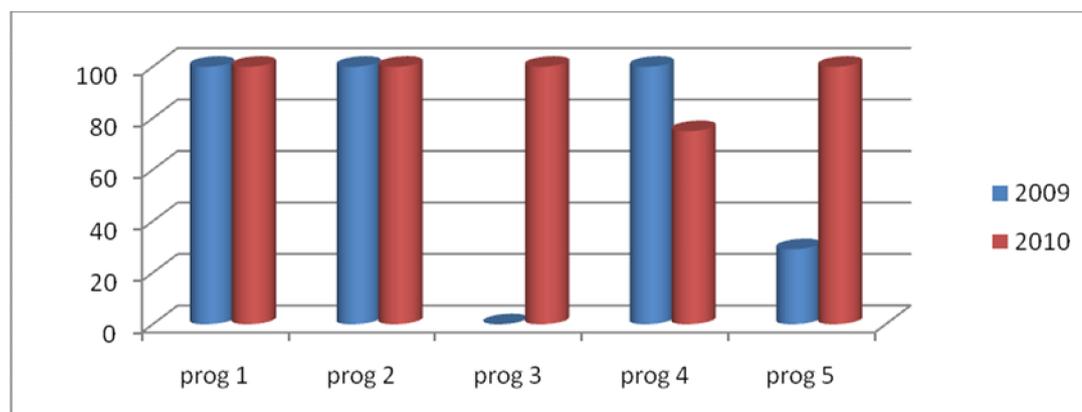
TABEL 2.4

PROGRAM PRIORITAS YANG DILAKSANAKAN TAHUN 2009 DAN 2010

No	Uraian	Tahun 2009		Tahun 2010	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
2	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	100%	100%	100%	100%
3	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	1 unit	0	1 unit	1 unit
4	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	100%	100%	100%	75%
5	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	230	67	60	60

Sumber : Profil Dinas Hubkominfo Tahun 2010

BAGAN 2.2
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2009 S/D TAHUN 2010



Sumber : Dinas Hubkominfo, 2011

Dari tabel 2.4 dan Bagan 2.1 di atas terlihat pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2009 mencapai 65,832% dan pada Tahun 2010 mencapai 95%, sehingga secara umum terdapat peningkatan kinerja secara signifikan.

Data pemanfaatan TIK dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut ini:

TABEL 2.5
DATA PEMANFAATAN TIK

No	Uraian	Keterangan
1	Website Kabupaten Jembrana (Tahun 2001)	Situs resmi Kabupaten Jembrana yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan pariwisata
2	Sistem Informasi Daerah (Tahun 2002)	Memuat informasi produk hukum, dan layanan SMS center
3	SMS center 0812870870 (Tahun 2002)	Sebagai <i>kotak saran digital</i> yang dapat diakses seluruh pengguna telpon seluler
4	Call center 44444 (Tahun 2002)	Sebagai <i>hotline center</i> , yang bisa diakses masyarakat
5	Kantor Maya (Kantaya) (Tahun 2004)	Sebagai sarana informasi dan komunikasi intern pegawai Pemkab Jembrana, untuk mengirim dan menerima dokumen, dan

		komunikasi vertikal dan horisontal.
6	Touchscreen (Tahun 2006)	Memuat informasi layanan publik yang bisa diakses di masing-masing kecamatan dan kantor pelayanan terpadu
7	M-CAP (Mobile Community Access Point) (Tahun 2008)	Sebagai fasilitas informasi, sosialisasi dan layanan internet bergerak, bagi masyarakat yang mampu menjangkau daerah di seluruh Kabupaten Jemberana
8	KTP-JID (Jemberana Identity) (Tahun 2009)	Merupakan smart card, kompilasi dari KTP berbasis SIAK, kartu jaminan kesehatan, dan kartu pegawai.
9	E-voting (Tahun 2009)	Merupakan kegiatan pemilihan langsung yang memanfaatkan sarana digital berupa layar sentuh, untuk efisiensi dan efektifitas

Sumber : Bidang Kominfo, Tahun 2010

Data Penyebarluasan/sosialisasi informasi pemerintahan dan pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL 2.6
DATA PENYEBARLUASAN/SOSIALISASI INFORMASI PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2010

No	Uraian	Keterangan
1	Majalah e-Jemberana	40.800eksemplar
2	Koran	10 koran lokal/nasional
3	Release berita	4.230 (media cetak) dan 746 (media elektronik)
4	Poster	1.000 lembar
5	Stiker	1.000 lembar
6	Balihoo	79 buah
7	Leaflet	1.000 lembar
8	Spanduk	75 buah
9	Calling	77 kali
10	Website	79.627 orang
11	M-CAP	240 kali
12	Tatap muka	insidental

13	SMS broadcast	insidental
----	---------------	------------

Sumber : Dinas Hubkominfo Tahun 2010

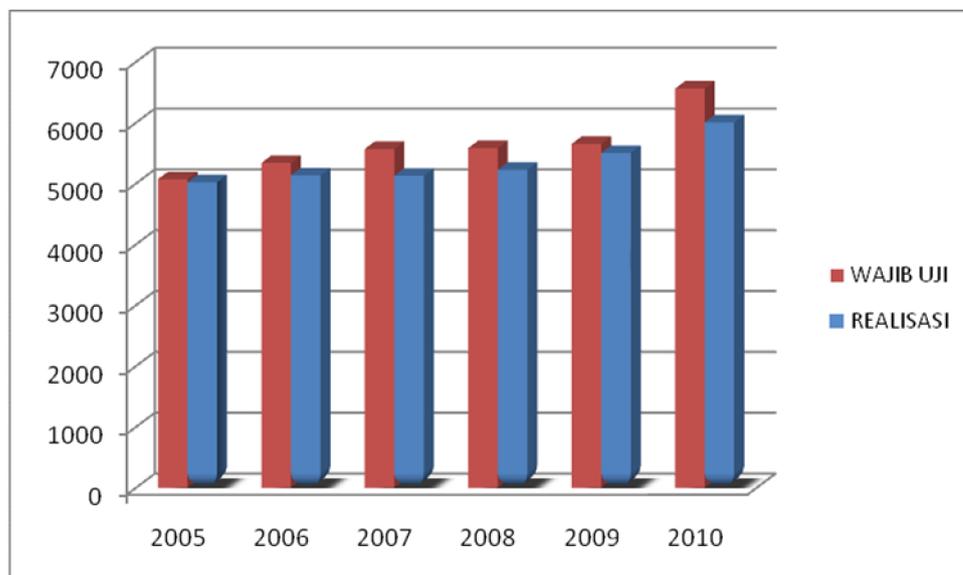
Kinerja layanan dalam urusan Perhubungan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 2.7
PERSENTASE PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

No.	Tahun	Uraian			Kenaikan/Penurunan	
		Wajib Uji	Realisasi	%	Jml	%
1	2005	5074	5023	98,99%	-	-
2	2006	5342	5137	96,16%	114	2,27%
3	2007	5572	5131	92,09%	-6	-0,12%
4	2008	5586	5228	93,59%	97	1,89%
5	2009	5655	5505	97,35%	277	5,30%
6	2010	6564	6007	91,51%	502	9,12%

BAGAN 2.3

REALISASI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR



Sumber : Bidang Sarana Prasarana dan Pengujian Kendaraan Tahun 2010

Data anggaran pendapatan dan belanja pada Dinas Hubkominfo dari Tahun 2008 sampai dengan 2010 dapat tabel 2.8 berikut ini :

TABEL 2.8
DATA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Tahun	Uraian	Pagu
2008	Pendapatan	Rp. 1.250.708.500,-
	Belanja	Rp. 10.399.081.279,-
2009	Pendapatan	Rp. 1.252.058.500,-
	Belanja	Rp. 10.799.469.705,-
2010	Pendapatan	Rp. 311.540.000,-
	Belanja	Rp.8.595.679.900,-

Sumber : Sub. Bagian Keuangan Setdis, Tahun 2010

TABEL 2.9
DATA REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM PRIORITAS
TAHUN 2009 DAN TAHUN 2010

No	Program	Tahun 2009 (000.000)			Tahun 2010 (000.000)		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	799,22	462,31	57,85	385,55	368,73	95,64
2	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	997,17	858,06	86,05	687,75	631,258	91,97
3	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	81,4	78,66	96,6	30	29,9	99,67
4	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	597,18	376,76	63,09	795,109	776,145	97,61
5	Program Kerjasama Informasi dan Media	1.661,21	1.497,09	90,12	784,79	731,728	93,29

	Massa						
				78,74			95,64

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2009, dan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2010

Tabel 2.9 di atas memperlihatkan adanya peningkatan kinerja yang pada tahun 2010 dari tahun 2009, diukur dari realisasi dibandingkan dengan pagu per program. Hal ini sungguh diharapkan bisa terus dilaksanakan dan dioptimalkan di tahun-tahun mendatang.

TABEL 2.10
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN JEMBRANA PROVINSI BALI

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target IKU	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Jumlah sarana alat pengujian kendaraan bermotor yang dikalibrasi	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	100%	100%	100%	100%
2	Jumlah kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	1 kali	-	-	-	1 kali	1 kali	-	-	-	1 kali	1 kali	-	-	-	100%	100%
3	Jumlah kendaraan pendukung kegiatan penciptaan layanan cepat, tepat, murah dan mudah	4 unit	-	-	4 unit	4 unit	6 unit	-	-	4 unit	4 unit	6 unit	-	-	100%	100%	150%
4	Jumlah fasilitas perijinan di bidang perhubungan yang tersedia	14 jenis	-	-	-	16 jenis	14 jenis	-	-	-	16 jenis	14 jenis	-	-	-	100%	100%
5	Frekuensi sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	5 kali	-	-	-	-	5 kali	-	-	-	-	5 kali	-	-	-	-	100%
6	Banyaknya unit pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor	1 unit	-	-	-	1 unit	1 unit	-	-	-	-	1 unit	-	-	-	-	100%
7	Tersedianya bahan perpustakaan umum daerah	1.342 eks	-	1.342 eks	2.286 eks	-	-	-	1.342 eks	2.286 eks	-	-	-	100%	100%	-	-
8	Jumlah fasilitas layanan komunikasi dan informasi yang tersedia	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	100%	100%	100%	100%	100%
9	Jumlah audit standard mutu organisasi yang dilaksanakan	2 kali	-	1 kali	-	1 kali	2 kali	-	1 kali	-	1 kali	1 kali	-	100%	-	100%	50%
10	Jumlah kegiatan sosialisasi informasi pembangunan daerah yang dilaksanakan	60 kali	-	-	-	230 kali	60 kali	-	-	-	67 kali	60 kali	-	-	-	29,13 %	100%
11	Banyaknya penyebaran informasi pembangunan daerah	2 kali	-	365 kali	-	-	2 kali	-	264 kali	-	-	1 kali	-	72,32 %	-	-	50%
12	Frekuensi penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	2000 kali	-	-	2000	365 kali	2000	-	-	2000	328 kali	1310 kali	-	-	100%	90,1%	65,5%

TABEL 2.11
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN
PADA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN JEMBRANA PROVINSI BALI

Uraian	Anggaran pada tahun ke – (dalam juta rupiah)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-(dalam juta rupiah)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Perhubungan																	
1.Peningkatan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan		775,72	116	81,4	30		718,95	88,63	78,66	23,43		92,68%	76,41%	96,63%	78,1%	-59,31%	85,96%
2.Peningkatan pelayanan angkutan penumpang umum dan barang		649,5	324	997,16	687,74		621,55	324	858,06	636,19		95,67%	100%	86,05%	92,5%	42%	93,56%
3. Rehabilitasi/pemeliharaan serta pengadaan sarana prasarana/fasilitas lalu lintas angkutan jalan		70,5	151,12	477,22	93,05		70,4	149,62	462,31	90,73		99,85%	99%	96,87%	97,5%	83,21%	98,31%
4. Pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai standard		-	45	322	292,5		-	44,88	-	292,5		-	99,73%	-	100%	303,2%	99,87%
Komunikasi dan Informatika																	
1. Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan		150,51	68,58	-	-		140,98	68,29	-	-		93,67%	99,58%	-	-	54,43%	96,63%
2.Pengembangan komunikasi, informasi dan media mass		1.049,49	606,75	597,17	795,10		740,57	579,81	376,76	740,09		70,56%	95,56%	63,09%	93,08%	-3,55%	80,57%
3. Kerjasama informasi dengan mass media		2.937,87	1.801,02	1.661,21	784,79		1.922,43	1.794,39	1.497,07	753,63		65,43%	99,63%	90,93%	96,02%	-33,07%	88%

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG

Seperti kata pepatah '*Siapa Menguasai Informasi, Dia Menguasai Dunia*' (*He Who Rules Information Rules the World*). Pepatah tersebut bukanlah isapan jempol semata. Dunia informasi dan kebutuhan akan berita merupakan suatu keniscayaan yang tidak terbantahkan. Siapapun yang memperoleh informasi terlebih dahulu akan dapat memperoleh hasil yang lebih baik, daripada orang lain. Era globalisasi (era digital), menjadikan dunia seperti tidak mempunyai batas yang nyata, arus informasi dapat datang dan pergi tanpa bisa dicegah, sehingga menjadikan batas wilayah suatu Negara seperti maya adanya. Manusia modern sangat ketergantungan akan media elektronik, khususnya kebutuhan akan berita. Hidup terasa hampa bila tidak mengetahui informasi yang sedang berkembang.

Berkaca pada Tahun 2008, pada masa kampanye Presiden Amerika Serikat, Barrack Obama (Presiden Amerika Serikat terpilih), yang sukses meraup suara terbanyak yang mengantarkannya ke Gedung Putih sebagai presiden Amerika ke-44, dan berhasil menyingkirkan Hillary Clinton dan Rudy Giuliani dan John McCain, yang nota bene sudah lebih dulu mendominasi. Obama memiliki 100 orang yang bekerja pada tim digitalnya di markas mereka di Chicago dan 40 orang lagi yang tersebar di negara-negara bagian lainnya. Hal ini pula yang menginspirasi partai politik Inggris, dan partai politik di dalam negeri untuk mengadopsi cara yang sama. Maka mulailah kebenaran dari doktrin *siapa yang menguasai informasi, ia menguasai dunia*, menjadi kenyataan.

Teknologi Informasi (IT) merupakan produk jaman modern yang selalu di-*upgrade* kemampuannya dari waktu ke waktu, bahkan bisa dikatakan kemajuan teknologi informasi tidak berbanding lurus dengan kemajuan di bidang lainnya. Bisa dikatakan Teknologi Informasi menjadi acuan bagi kemajuan bidang lainnya. Suatu

berita yang menyebar dapat dengan mudah menimbulkan reaksi baik pro maupun kontra, bahkan dapat menimbulkan aksi anarkhis.

Kondisi ini sangat dipahami oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana, sehingga arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Jembrana, memberikan angin segar bagi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Jembrana. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, melalui tim IT menangkap hal tersebut sebagai peluang untuk semakin mendekatkan pemanfaatan IT dalam kegiatan pemerintahan, baik dalam perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Di lain pihak dengan pemanfaatan IT, memberikan peluang bagi masyarakat untuk semakin terlibat dalam tahapan-tahapan pemerintahan, dari pemilihan pemimpin, penentuan program dan kegiatan, serta dalam pengawasan, untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi publik.

Pemanfaatan IT di Jembrana selain sebagai sarana komunikasi dengan *stake holders*, juga sebagai sarana informasi dan sosialisasi publik. Teknologi informasi menjadi sarana yang ampuh, di tengah kesadaran masyarakat akan kebutuhan informasi, untuk memperkenalkan terhadap kebijakan dan bahkan sosok pemerintahan itu sendiri. IT bisa menjadi senjata yang ampuh untuk membentuk pencitraan sesuatu ataupun seseorang, tidak terkecuali pemerintahan itu sendiri. Namun informasi layaknya sebuah senjata, tinggal bagaimana kita menggunakannya. Penggunaan dengan tepat akan memberikan keuntungan dan manfaat yang baik, sebaliknya sekali salah mempergunakannya kerugian yang siap menanti.

Beberapa hal pendukung harus disiapkan untuk menunjang keberlanjutan e-development di Jembrana, yaitu peningkatan sarana dan prasarana; penambahan jumlah tenaga ahli; peningkatan kompetensi SDM yang telah dimiliki saat ini; serta peningkatan alokasi anggaran. Selama ini kendala paling utama yang dirasakan adalah

minimnya anggaran yang bisa dialokasikan untuk pengembangan jaringan komunikasi dan informasi.

Dalam urusan perhubungan, dengan semakin padatnya aktivitas masyarakat, dari pagi hingga malam hari, berimplikasi pada padatnya jalur perhubungan dan transportasi. Kabupaten Jembrana bukanlah daerah padat yang terbayangi macet dalam kesehariannya. Namun hal tersebut justru menjadi peluang yang baik untuk mulai merintis jalur peseda, pejalan kaki, dan zona sekolah. Masih cukup banyak alternatif yang masih bisa dikembangkan untuk mencegah Jembrana menjadi kota macet seperti Denpasar, terlebih Jakarta.

Arah kebijakan Kabupaten Jembrana yang mendukung terciptanya sarana transportasi yang mudah diakses, murah dalam biaya, dan ramah lingkungan, menjadi sinyal yang baik bagi berkembangnya sarana transportasi yang baik, khususnya yang melayani wilayah yang menghubungkan antar kecamatan, bahkan sarana transportasi dengan jalur trayek Denpasar Gilimanuk. Hal ini untuk menyediakan layanan transportasi darat yang layak, sehingga mampu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Hal tersebut selain membantu permasalahan macet pada jalur tanjakan tajam di daerah sekitar Kabupaten Tabanan, juga membantu memecahkan permasalahan pekerjaan umum, dimana dapat mengurangi tekanan pada jalan perhubungan kabupaten tersebut. Selama ini permasalahan tersebut masih sebatas dalam pembahasan dan pengkajian, namun belum menyentuh substansi pokoknya. Pengaktifan jembatan timbang di Pelabuhan Gilimanuk mungkin menjadi salah satu solusi terhadap permasalahan tersebut.

Keberadaan SDM yang masih relatif terbatas menjadi salah satu faktor penghambat yang harus menjadi perhatian. Dengan meningkatnya dan pengoptimalisasi peran bidang perhubungan dalam penataan dan pengamanan lalu

lintas teritorial, sehingga membutuhkan penambahan SDM, dan juga peningkatan kompetensi pegawai melalui kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, serta kunjungan kerja ke daerah lain untuk belajar dari keberhasilan yang telah diraih oleh daerah-daerah lain di Indonesia.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 27 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Bupati Jembrana Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, ada 2 (dua) tugas pokok yang menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, yaitu menyelenggarakan pelayanan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan, dan pelayanan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi informatika.

Dalam urusan perhubungan, ada 3 (tiga) tugas utama yang harus dilaksanakan yaitu :

1. Peningkatan keselamatan dan kenyamanan penumpang angkutan umum;

Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi. Kondisi sarana transportasi menjadi faktor utama untuk meningkatkan keselamatan penumpang, untuk itu kelayakan kendaraan angkutan dalam beroperasi harus selalu menjadi perhatian, sehingga kecelakaan lalu lintas akibat kerusakan mesin dapat dihindari.

Selain itu kebersihan dan kenyamanan lingkungan di sekitar halte dan terminal membutuhkan perhatian yang serius. Termasuk saluran air dan tempat pembuangan sampah, sehingga tidak ada genangan air ataupun tumpukan sampah yang dapat menghambat proses pelayanan transportasi.

Ada beberapa faktor yang berpengaruh dalam kegiatan ini, diantaranya:

Faktor pendorong :

- Kondisi sarana kalibrasi/alat uji kelayakan kendaraan yang berfungsi baik;

- Tersedianya petugas kebersihan dan keamanan terminal yang memadai;
- Dilaksanakannya pengawasan dan pengendalian (wasdal) melalui koordinasi dengan pihak terkait (Polantas) untuk meningkatkan ketertiban dan keselamatan lalu lintas;

Faktor penghambat :

- Masih adanya kendaraan yang belum melakukan KIR sehingga bisa mengganggu kenyamanan penumpang;
- Terdapatnya pelanggaran lalu lintas yang mengancam keselamatan penggunaan jalan dan angkutan;
- Masih manualnya alat pengujian kendaraan bermotor

2. Pemeliharaan sarana prasarana dan fasilitas LLAJ:

.Pemeliharaan/rehabilitasi sarana prasarana transportasi menjadi bagian yang vital untuk mendukung pelayanan lalu lintas.

Ada beberapa faktor yang berpengaruh dalam kegiatan tersebut, di antaranya:

Faktor pendorong :

- Tersedianya gedung pengujian guna meningkatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor;

Faktor penghambat :

- Keterbatasan sumber daya manusia dalam hal pelaksanaan teknis di bidang pengujian dan perhubungan;
- Belum tersedianya sarana pengujian kendaraan bermotor yang optimal

3. Penyediaan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan;

Selama ini anggapan penyebab utama dari kecelakaan lalu lintas adalah *human error* semata, hanya menimpakan kesalahan pada si pengemudi, namun keberadaan rambu-rambu lalu lintas memegang peran yang cukup signifikan. Misalnya pada titik rawan kecelakaan seperti jalan licin, tebing curam, belokan tajam, areal parkir ataupun area sekolah. Dengan adanya rambu-rambu lalu lintas, maka si pengemudi dapat mengetahui kondisi daerah tersebut, sehingga tertib lalu lintas dapat diwujudkan.

Selain itu keberadaan marka jalan memegang peran yang sangat penting dalam menentukan arah, dan jalur bagi pengemudi. Khususnya di jalur tikungan, dimana kendaraan diharapkan untuk tidak saling mendahului ataupun di area sekolah dan sekitar pasar tradisional. Dengan pemanfaatan tanda-tanda peringatan bagi pengendara diharapkan mengurangi kecelakaan lalu lintas yang masih sering mengancam pengguna jalan.

Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kegiatan ini, diantaranya :

Faktor pendorong:

- Rambu yang tersedia masih berfungsi dengan baik;
- Tidak adanya kemacetan di jalan raya.

Faktor Penghambat :

- Jumlah sarana rambu lalu lintas yang kurang memadai;

Dalam urusan komunikasi dan informatika, ada 2 (dua) tugas utama yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Peningkatan akses informasi dan komunikasi bagi masyarakat dan jajaran birokrasi Pemkab Jembrana;

Era globalisasi berdampak kepada kebutuhan masyarakat akan informasi. Kebutuhan akan informasi dan selalu *up to date* dengan perkembangan dunia menjadi bagian dari kebutuhan primer masyarakat dewasa ini.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Jembrana melalui tim IT membangun sebuah jaringan komunikasi dan informasi yang berbasis *open source*, bahkan sebelum ditetapkannya Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan pendampingan dari BPPT, disusunlah sebuah sistem informasi manajemen daerah dalam bentuk e-government, sejak tahun 2001 yang diawali dengan dibentuknya *Website* (situs resmi) Kabupaten Jembrana, www.jembrana.go.id, yang kemudian pada tahun 2008 menjadi www.jembranakab.go.id, dengan tampilan baru.

Hal tersebut semata-mata untuk membuka akses informasi, dan memberikan ruang gerak bagi masyarakat untuk ikut serta dalam proses pemerintahan dan pembangunan.

Adapun faktor pendorong dan penghambat dalam kegiatan ini diantaranya :

Faktor pendorong :

- Telah terbangunnya jaringan komunikasi dan informasi sejak tahun 2001;
- Kualitas sumber daya manusia yang memadai.

Faktor penghambat:

- Tidak tersedia anggaran yang cukup memadai;
- Sarana dan prasarana yang kurang memadai.
- Masih perlu adanya penambahan sumber daya manusia

2. Penyebarluasan informasi pemerintahan dan pembangunan daerah

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jembrana penting untuk disosialisasikan kepada masyarakat secara formal maupun informal, untuk mendapatkan *feed back* sehingga kebijakan yang diambil tersebut dapat dirasakan masyarakat, dan bisa betul-betul sampai kepada tujuan yang ingin dicapai.

Selama ini sosialisasi kebijakan dan program pembangunan dilaksanakan dengan sistem tradisional, yang nota bene selalu menggunakan media kertas, layar, dan media cetak lainnya. Namun dengan memasyarakatnya internet dewasa ini, media digital semakin populer dan dianggap sebagai sarana sosialisasi yang paling efektif.

Dalam rangka sosialisasi pembangunan dan informasi kegiatan pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Jembrana memanfaatkan sarana cetak berupa majalah, koran, baliho, spanduk, leaflet, brosur, dan juga melalui situs resmi Pemkab Jembrana www.jembranakab.go.id, dan media *Calling* untuk informasi kegiatan sosial budaya (hiburan rakyat) yang akan diselenggarakan.

Adapun faktor pendorong dan penghambat dalam kegiatan ini diantaranya:

Faktor pendorong :

- Adanya pemanfaatan teknologi (IT) yang mendukung sosialisasi pembangunan;
- Tersedianya layanan internet untuk mendukung penyampaian informasi dan sosialisasi kepada masyarakat;
- Tersedianya sumber daya manusia yang memadai guna mendukung sosialisasi dan penyampaian informasi

Faktor Penghambat :

- Fasilitas penunjang informasi dan komunikasi yang masih terbatas;

- Perlunya peningkatan kerjasama dan dukungan dari berbagai SKPD dalam penyampaian informasi

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM PEMKAB JEMBRANA

Sebagai bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Jembrana, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika selalu mengacu kepada Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Jembrana, yang berangkat dari potensi dan kondisi yang ada.

Adapun Visi Pembangunan Kabupaten Jembrana, adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Jembrana Melalui Peningkatan Perekonomian dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia Yang Dilandasi Semangat Kebersamaan, Kewirausahaan dan Pemberdayaan Masyarakat.”

Dari Visi tersebut, diterjemahkan ke dalam 5 (lima) Misi Pembangunan sebagai berikut :

- a. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan;

Pemerintahan yang bersih dan akuntabel menggambarkan bahwa setiap unsur aparatur pemerintah menyadari setiap tugas dan kewajibannya sebagai pelayan masyarakat, sehingga tertanam dalam pribadi masing-masing untuk bertindak jujur dan bertanggung jawab, dengan memberikan pelayanan yang profesional yang pada akhirnya dapat mewujudkan kepuasan kepada masyarakat.

Aspiratif, partisipatif dan transparan mempunyai makna bahwa pemerintah peka terhadap keinginan masyarakat, dan proses penyusunan kebijakan serta perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan demokratis, diikuti pelaksanaan yang terbuka/transparan.

- b. Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis dan pemberdayaan masyarakat;

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Jembrana, yaitu dengan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat dengan mengutamakan pertumbuhan sektor pertanian, perikanan dan kelautan sebagai basis ekonomi masyarakat tanpa harus meninggalkan sektor-sektor yang lain.

Dalam pencapaian Misi ke-2 ini, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana memiliki peran untuk memberikan kelancaran baik guna mendukung kelancaran perekonomian dalam meningkatkan potensi basis dan pemberdayaan masyarakat.

- c. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya;

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah dengan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas pendidikan, dengan memanfaatkan teknologi modern serta meningkatkan aksesibilitas dalam bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya dalam menyiapkan generasi penerus yang cerdas, terampil, mandiri dan berwawasan sehingga mampu menghadapi perubahan serta perkembangan kemajuan jaman.

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika menjadi salah satu dari tujuh SKPD yang bertanggung jawab untuk mengawal misi tersebut.

Pemanfaatan teknologi modern yang berbasis IT (*Information Technology*) menjadi faktor pendukung untuk meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan dan pendidikan. Untuk bidang pendidikan, dengan adanya sistem informasi manajemen pendidikan, membuka informasi bagi tenaga pendidikan, peserta didik, maupun pelaku dunia pendidikan untuk mendapatkan akses informasi pendidikan yang ada di Jembrana.

Pengembangan jaringan internet ke seluruh sekolah, untuk membuka akses informasi bagi seluruh penggunanya, sehingga siswa diperkenalkan terhadap kemajuan informasi dan komunikasi sejak dini. Alur informasi begitu dinamis dan cepat, sehingga setiap orang perlu meng-*update* informasi setiap saat. Internet menjadi salah satu sarana yang efektif untuk memperoleh informasi terkini yang bisa diakses dengan sangat mudah dan oleh siapa saja.

Pemanfaatan teknologi modern di bidang kesehatan, menjadi faktor pendukung bagi efektifitas dan efisiensi dalam pemberian pelayanan kesehatan masyarakat, disamping menjadi program integral dengan pemanfaatan kartu askes ber-*barcode* di Indonesia.

- d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;

Tersedianya sarana dan prasarana publik, baik secara kuantitas maupun kualitas yang baik, seperti prasarana jalan, jembatan, irigasi dan lain-lainnya. Peningkatan ketersediaan infrastruktur akan dapat mempercepat proses pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kualitas layanan masyarakat.

Sarana dan prasarana perhubungan menjadi faktor yang sangat penting, disamping ketersediaan marka jalan dan rambu-rambu lalu lintas, berupa traffic light, warning light, dan rambu-rambu penunjuk jalan.

Dalam hal kelestarian lingkungan, untuk mendukung komitmen terhadap Bali Go Green, optimalisasi terhadap pengujian emisi kendaraan bermotor sangat penting dilakukan mengingat polusi udara di Indonesia semakin memprihatinkan dengan peringkat tertinggi ketiga di dunia. Pun demikian dengan kondisi udara di kota-kota besar, seperti Denpasar, Jakarta dan Bandung. Untuk itu perlu perhatian yang khusus terhadap kendaraan bermotor untuk senantiasa melakukan uji emisi berkala.

- e. Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas, sehingga terpenuhi rasa aman, damai dan tenteram dalam kehidupan masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui penegakkan peraturan dan adanya kepastian hukum. Dengan demikian akan tumbuh kehidupan masyarakat yang saling menghargai, toleransi, dan saling menjaga kerukunan antar umat beragama.

Untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, partisipasi masyarakat menjadi faktor penting, karena merupakan kegiatan yang bersinergis dan berkesinambungan. Sosialisasi terkait peraturan kependudukan dan kebijakan publik perlu dilakukan sehingga masyarakat mengerti akan hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Sehingga benturan dan gesekan di masyarakat dapat diminimalisir.

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L

Kebijakan pembangunan nasional jangka menengah seperti tertuang dalam Peraturan Presiden RI nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014. Kebijakan dimaksud merupakan perencanaan pembangunan tahap kedua dari pelaksanaan RPJPN 2005-2025 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. RPJMN 2010-2014 ini selanjutnya akan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun/menyesuaikan pembangunan daerahnya dalam rangka mencapai sasaran nasional.

Urusan Perhubungan dan Urusan Komunikasi dan Informatika menjadi prioritas enam dalam perencanaan pembangunan nasional jangka menengah, bersama-sama dengan urusan bidang infrastruktur lainnya, untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat umum di

seluruh bagian Negara kepulauan Republik Indonesia dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Substansi inti dalam bidang perhubungan adalah pembangunan jaringan prasarana dan penyediaan sarana transportasi antar-moda dan antar-pulau yang terintegrasi sesuai dengan Sistem Transportasi Nasional dan Cetak Biru Transportasi Multimoda dan penurunan tingkat kecelakaan transportasi sehingga pada 2014 lebih kecil dari 50% keadaan saat ini.

Untuk mencapai sasaran dalam rangka meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka prioritas arah kebijakan dan strategi yang menjadi pengarusutamaan adalah meningkatkan keselamatan dan kualitas pelayanan transportasi secara komprehensif dan terpadu dari berbagai aspek (pencegahan, pemenuhan kelengkapan navigasi pelayaran dan udara, rambu-rambu lalu lintas, sistem persinyalan kereta api, pembinaan dan penegakan hukum, penanganan dampak kecelakaan dan daerah rawan kecelakaan, sistem informasi kecelakaan lalu lintas, kelaikan sarana prasarana transportasi, serta pengguna transportasi).

Peningkatan pelayanan transportasi minimal yang memadai dan merata juga menjadi prioritas guna mewujudkan sistem logistik nasional yang menjamin distribusi bahan pokok, bahan strategis dan nonstrategis untuk seluruh masyarakat melalui penyediaan pelayanan angkutan (termasuk angkutan perintis) dari dan menuju di daerah pedesaan. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi pedesaan diprioritaskan untuk memperkuat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan perhubungan di Kabupaten Jembrana, lebih kepada kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana lalu lintas yang dimiliki, untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan berlalu lintas, sehingga dapat

mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dengan pemeliharaan rambu, traffic light, warning light, dan sosialisasi keamanan lalu lintas serta pelaksanaan pengujian kelayakan kendaraan bermotor diharapkan dapat menjadi faktor penting dalam mewujudkan pelayanan di bidang perhubungan bagi masyarakat Jembrana.

Sedangkan dalam bidang telekomunikasi, penuntasan pembangunan jaringan serat optik di Indonesia bagian timur sebelum 2013 dan maksimalisasi tersedianya akses komunikasi data dan suara bagi seluruh rakyat, menjadi substansi inti pembangunan jangka menengah.

Arah kebijakan yang ditempuh dan terkait dengan Fokus Peningkatan Pelayanan Sarana dan Prasarana Sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah : 1) Pemerataan penyediaan sarana, prasarana dan layanan komunikasi dan informatika, dengan strategi : kerjasama dengan penyelenggara komunikasi dan informastika dalam memetakan daerah blank spot; pengalokasian APBN dan pemberian subsidi secara tepat sasaran; peningkatan efisiensi dan manfaat bidang kominfo maupun lintas sub bidang; dan peningkatan kerjasama dengan badan usaha yang dipilih melalui proses yang kompetitif dan transparan dalam pembangunan dan penyelenggaraan kominfo di wilayah non komersial; 2) Pemberdayaan Informasi, dengan strategi : pengembangan konten lokal; pelatihan, sosialisasi, dan edukasi untuk meningkatkan pemahamana dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan informasi dan TIK untuk kegiatan yang produktif; dan fasilitasi komunitas informasi sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan informasi dan pengawasan terhadap kepatutan konten.

Sejak Tahun 2001, pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi di Kabupaten Jembrana sudah mulai diperkenalkan luas dengan dibangunnya situs web resmi Pemkab Jembrana www.jembrana.go.id (sekarang menjadi www.jembranakab.go.id). Hal ini menjadi awal dari pengembangan jaringan

komunikasi dan informasi di Jembrana, dengan pemanfaatan Kantaya (Kantor Maya) yang bisa diakses oleh seluruh pegawai Pemkab Jembrana, dengan fasilitas e-mail, lemari arsip, dokumen dan produk hukum, dan semakin berkembang dengan dibangunnya jaringan komunikasi dan informasi di seluruh wilayah Kabupaten Jembrana, dengan sasaran utama sekolah dan kantor pemerintahan.

Kendala yang masih dirasakan dan untuk menjadi perbaikan di Tahun 2012 adalah pemanfaatan serat optik dalam jaringan kominfo yang telah terbangun, untuk meningkatkan kemampuan akses data. Sehingga lebih memudahkan dalam koneksi internet, browsing situs web, dalam dalam pengiriman data elektronik.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Kebutuhan akan perencanaan terhadap tata ruang wilayah di Kabupaten Jembrana menjadi hal yang krusial mengingat besarnya dampak yang timbul akibat kesalahan dalam penataan kota, ataupun tidak adanya pedoman dalam penataan perkotaan, contohnya banjir yang sering melanda Jakarta, rusaknya senderan sungai, dan masih banyak contoh lainnya, yang pada akhirnya menjadi bencana bagi umat manusia.

Tata Ruang Wilayah memiliki fungsi penting dalam memaksimalkan potensi tata ruang suatu daerah, contoh kota pelajar, kota wisata, kota industry, dan lain sebagainya; meminimalisir konflik social; dan meminimalisir kerugian akibat bencana alam.

Visi penataan ruang di Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut :

- Aman : masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman;

- Nyaman : memberi kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mengartikulasikan nilai-nilai sosial budaya dan fungsinya sebagai manusia dalam suasana yang tenang dan damai;
- Produktif : proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing;
- Berkelanjutan : kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, tidak hanya untuk kepentingan generasi saat ini, namun juga generasi yang akan datang.

Terdapat beberapa isu dan permasalahan yang timbul dalam penataan ruang dan wilayah di Kabupaten Jembrana, yaitu :

- Belum terwujudnya kesamaan pola pikir dan cara pandang para aparatur pemerintah (eksekutif) dan legislatif terhadap penataan ruang;
- Kurangnya komitmen politik dan koordinasi antar sektor guna mendukung terselenggaranya penataan ruang yang baik;
- Pemecahan bidang tanah yang luas menjadi kaveling-kaveling kecil tanpa mengacu pada Rencana Tata Ruang;
- Tindak lanjut pemanfaatan ruang dengan skala investasi pembangunan yang masih belum didukung kajian kelayakan sehingga pembangunan terkesan mubasir, biaya pemeliharaan yang tidak diperhitungkan serta tidak didukung SDM yang memadai;
- Tidak jelasnya karakter dan potensi unggulan pembangunan serta belum berkembangnya kesejatian kearifan lokal;
- Berkurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan penataan RTH yang tidak sesuai dengan penyediaan ruangnya;

- Investasi di sektor pariwisata dan property tumbuh sangat pesat dan sporadis;
- Pembangunan tanpa informasi tata ruang dan perijinan;
- Penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang belum optimal.

Pengendalian pemanfaatan tata ruang memerlukan peran serta dari segenap stake holder pada wilayah Kabupaten Jembrana, untuk saling memegang peran dari awal tahap perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, hingga pengendalian. Hal ini termasuk pemberian ijin usaha, mendirikan bangunan dan perubahan status lahan untuk kegiatan usaha ataupun perumahan, dan penentuan zona-zona wilayah (zonasi) sesuai peruntukannya.

Dalam urusan perhubungan zonasi sangat diperlukan untuk membantu dalam hal pemasangan rambu-rambu, contoh di daerah pemukiman penduduk, kawasan sekolah, dan lain-lain. Sedangkan dalam urusan komunikasi dan informatika, zonasi diperlukan dalam penentuan kawasan untuk pembangunan tower, pemasangan balihoo, spanduk, dan lain sebagainya.

3.5 ISU STRATEGIS

a. Urusan Perhubungan.

Dalam layanan perhubungan, terdapat beberapa isu strategis, diantaranya :

1. Penataan Kawasan Gilimanuk sebagai Gerbang Pulau Bali

Kelurahan Gilimanuk, merupakan daerah paling ujung barat Kabupaten Jembrana dan Pulau Bali, menjadikannya daerah strategis termasuk rawan akibat adanya arus keluar masuk orang dan barang melalui pelabuhan penyeberangan Gilimanuk dari dan ke Pulau Jawa. Untuk itu diperlukan

penataan kawasan baik daerah sekitar maupun pelabuhan penyeberangan itu sendiri.

Sebagai filter atas arus masuknya penduduk liar dan penyelundupan, maka diperlukan sistem pengawasan yang lebih baik dengan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi, untuk meminimalisir potensi ancaman gangguan hambatan dan tantangan terhadap masuknya penduduk gelap dan peningkatan kriminalitas di Bali secara global. Pemanfaatan alat berteknologi canggih seperti CCTV, metal detector, pemeriksaan dengan x-ray, yang bisa membantu pengawasan manual yang selama ini telah dilakukan, sehingga kewaspadaan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban selalu terpantau dan diupayakan untuk dicegah sedini mungkin, yang tentu saja untuk mewujudkan rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat Kabupaten Jembrana dan Provinsi Bali secara keseluruhan.

Sebagai gerbang Pulau Bali, tentu saja tidak lepas dari keberadaan kendaraan barang yang senantiasa keluar masuk pada terminal Gilimanuk. Sehingga keberadaan terminal Gilimanuk menjadi bagian integral yang harus mendapat perhatian dan penataan mengingat kondisi sekarang yang memerlukan perbaikan yang cukup signifikan, dengan adanya kerusakan pada bagian vital, yaitu atap, lantai termasuk jalan masuk ke terminal. Besarnya anggaran yang dibutuhkan menjadi catatan penting yang harus mendapatkan perhitungan yang matang, sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan yang lain.

2. Zone Selamat Sekolah (Zoss)

Zona sekolah atau lebih dikenal di Indonesia sebagai Zona Selamat Sekolah (Zoss) adalah suatu kawasan di sekitar sekolah yang perlu dikendalikan lalu lintas kendaraan menyangkut kecepatan, area parkir, pengutamaan terhadap pejalan kaki yang menyeberang jalan. Pengendalian perlu dilakukan mengingat banyak anak-anak sekolah yang berjalan kaki menuju sekolah, ataupun menggunakan sepeda.

Karena anak-anak sekolah khususnya yang baru duduk di Sekolah dasar masih sangat rentan dalam berlalu lintas khususnya pada saat menyeberang jalan di depan sekolah, oleh karena itu perlu didesain dengan cermat menyangkut:

- Trotoar
- Warna jalan di depan sekolah, biasanya digunakan warna merah sehingga menjadi karpet merah.
- Perambuan :
 - Rambu lalu lintas berupa rambu batas kecepatan (25 km/jam), rambu larangan parkir, rambu dilarang menyalip.
 - Marka jalan berupa marka zebra cross, marka dilarang parkir, marka membujur dan melintang lainnya.
 - Lampu lalu lintas bila diperlukan, khususnya di sekolah yang berada dipinggir jalan arteri yang padat.



Gambar 3.1 :
'Karpets merah' di Surakarta



Ket. Gambar 3.2 :
Rambu Zoss di California

3. Pengujian Kendaraan Bermotor (Uji Emisi Kendaraan)

Sesuai dengan amanat Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengujian berkala kendaraan bermotor adalah pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor dan ada pula pengesahan hasil uji yang dilaksanakan oleh unit pelaksana pengujian pemerintah kabupaten/kota, unit pelaksana agen tunggal pemegang merk yang mendapat izin dari pemerintah, atau unit pelaksana pengujian swasta yang mendapatkan izin dari pemerintah.

Di Kabupaten Jembrana, sementara ini hanya Pemerintah Kabupaten Jembrana melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang berwenang untuk melaksanakan pengujian berkala tersebut. Sehingga alat uji kendaraan bermotor yang dimiliki, selain kemampuan tim teknis, juga harus selalu dalam kondisi baik, dan dengan kualitas yang memadai.

Kebutuhan akan uji emisi kendaraan sejalan dengan pencanangan *Bali Go Green* oleh Gubernur Bali Mangku Pastika akhir tahun 2009 lalu, demi kelangsungan alam Bali yang bersih dari polusi udara, air dan tanah.

b. Urusan Komunikasi dan Informatika

Dalam layanan komunikasi dan informatika, terdapat beberapa isu strategis, diantaranya :

1. Keterbukaan Informasi Publik

Informasi Publik memiliki makna : segala informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Sesuai Undang-undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, reformasi dalam NKRI membawa perubahan dalam sistem pemerintahan Negara yang ditandai dengan adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang mensyaratkan ditetapkannya prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Hak untuk mendapatkan

informasi merupakan hak asasi manusia untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya.

Keterbukaan informasi publik mempunyai makna yang luas, karena semua pengelolaan badan/instansi publik harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Maka semua badan/instansi publik berkewajiban untuk menyampaikan informasi publik secara terbuka kepada masyarakat.

Tujuan dari undang-undang tersebut adalah untuk meningkatkan kemampuan instansi publik Negara dalam memberikan informasi kepada masyarakat, sekaligus guna mencerdaskan masyarakat dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik.

Dalam implementasinya, membutuhkan kesiapan yang cukup memadai bagi kesiapan instansi publik yang akan memberikan layanan informasi publik. Karena selain diperlukannya aturan teknis yang lebih jelas mengatur hal ini, juga diperlukan adanya kesiapan masyarakat untuk mengetahui hak memperoleh informasi publik, diperlukan adanya pemahaman dan edukasi undang-undang tersebut baik kepada kalangan masyarakat maupun bagi instansi publik yang melakukan pelayanan publik itu sendiri.

2. Komitmen terhadap e-development

Di era globalisasi, teknologi informasi berperan sangat penting. Kemajuan yang pesat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di Negara-negara maju karena didukung oleh sistem informasi yang mapan. Sebaliknya sistem informasi yang lemah di Negara berkembang, termasuk Indonesia, mengakibatkan keterbelakangan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Informasi merupakan modal utama dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang menjadi senjata pokok untuk membangun negara/wilayah. Sehingga apabila ingin tetap eksis dalam persaingan global, maka penguasaan terhadap informasi adalah mutlak perlu. Pun demikian dengan kecepatan dan ketepatan informasi, karena cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi begitu berpacu dengan usia informasi, informasi yang sudah usang akan terabaikan dengan adanya informasi yang lebih baru.

Perkembangan teknologi informasi di Kabupaten Jembrana memerlukan komitmen dari semua pihak, terutama aparatur pemerintah sebagai pelaksana kebijakan, dan masyarakat luas selaku *stake holder*. Selama kurun waktu 9 (sembilan) tahun, telah dibangun sistem informasi daerah yang terpadu, dalam konteks pemanfaatan teknologi informasi yang bersifat menyeluruh, dan terkoordinasi secara dinamis dan realistis, untuk mendukung kegiatan-kegiatan pemerintahan, dari mulai perencanaan, pelaksanaan, maupun pengevaluasian.

Membangun sistem informasi dan komunikasi, merupakan proses dinamis yang berkesinambungan dan membutuhkan pengembangan lebih lanjut. Sistem yang telah terbangun menjadi bagian integral dalam pembangunan itu sendiri untuk semakin memberikan nilai yang lebih bagi pemilik teknologi itu sendiri.

Peningkatan sumber daya manusia serta sarana prasarana untuk selalu mampu menyeimbangkan diri dengan perkembangan teknologi informasi menjadi bagian terpenting dalam membangun sistem informasi pemerintah yang berhasil dan bermanfaat bagi birokrasi dan pemerintah.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, SERTA CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

4.1 VISI DAN MISI SKPD

Visi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian sebuah organisasi atau perusahaan yang ingin dicapai di masa depan (Wibisono, 2006:43). Kotler, seperti diungkapkan oleh Nawawi (2000:122), menyatakan *Visi* adalah pernyataan tentang tujuan organisasi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang ditawarkan, kebutuhan yang dapat ditanggulangi, kelompok masyarakat yang dilayani, nilai-nilai yang diperoleh serta aspirasi dan cita-cita masa depan. Atau dapat pula dikatakan *Visi* merupakan pernyataan *want to be* dari suatu organisasi atau perusahaan, untuk menjamin kelestarian dan kesuksesan jangka panjang.

Visi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana adalah : ***“Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima di Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang Dilandasi dengan Pemberdayaan dan Peningkatan Profesionalisme Sumber Daya Manusia”***.

Visi tersebut mengandung 3 (tiga) pengertian penting yaitu Pelayanan Publik, Pelayanan Prima dan SDM. Pelayanan Publik mengandung pengertian segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Pelayanan Prima (*Service Excellence*) yang dimaksud adalah pelayanan yang menggunakan pendekatan sikap yang berkaitan dengan kepedulian kepada pelanggan, upaya melayani dengan tindakan yang terbaik dan ada tujuan untuk

memuaskan pelanggan dengan berorientasi pada standard layanan tertentu (Swastika 2:2005). Sehingga ***Pelayanan Publik yang Prima*** mengacu kepada *Pelayanan barang jasa dan jasa publik yang berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat, dengan mengacu kepada standard minimal pelayanan, dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Sedangkan Peningkatan kualitas SDM diperlukam untuk menciptakan pelayan masyarakat yang profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai yang diharapkan.

Misi merupakan alasan mendasar eksistensi suatu organisasi (Drucker, 2008:87). Dengan kata lain Misi adalah sebabnya organisasi itu ada (*why we exist / what we believe we can do*). Pernyataan misi harus mampu menentukan kebutuhan apa yang dipuasi oleh perusahaan, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut, dimana mereka berada dan bagaimana pemuasan tersebut dilakukan. Jadi Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh organisasi/lembaga dalam usahanya mewujudkan Visi. Misi merupakan sesuatu yang nyata untuk dituju serta dapat pula memberikan petunjuk garis besar cara pencapaian Visi.

Adapun Misi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan sarana transportasi yang efektif dan efisien sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial, budaya dan keamanan masyarakat.

Untuk mewujudkan sarana transportasi yang efektif dan efisien diperlukan penataan tertib berlalu lintas sehingga menjamin keamanan, kenyamanan, serta menopang kelancaran dinamika pembangunan dan sebagai urat nadi kelancaran kehidupan ekonomi, sosial budaya.

2. Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana transportasi serta pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Untuk meningkatkan keselamatan dalam lalu lintas, diperlukan dukungan sarana prasarana, berupa rambu lalu lintas, marka jalan, dan kondisi kendaraan yang laik pakai.

3. Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik.

Untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik, dibutuhkan optimalisasi terhadap peran keterbukaan informasi publik, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, berupa media cetak, elektronik dan digital.

4. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Untuk mewujudkan pendayagunaan informasi komunikasi secara optimal, dilakukan secara terkoordinasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, yang terpadu, dinamis, dan terkoordinasi.

4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Tujuan akan dicapai yaitu :

- a. Meningkatkan pelayanan di bidang perhubungan;
- b. Meningkatkan pelayanan di bidang komunikasi dan informatika.

Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan- tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dapat dicapai.

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana adalah :

- a. Pada Misi pertama terdapat 2 (dua) buah sasaran, yaitu :

1. Tersedianya sarana transportasi yang berkualitas dan terjangkau;
 2. Terlaksananya pengembangan dan pemeliharaan sarana transportasi.
- b. Pada Misi kedua terdapat 2 (dua) buah sasaran, yaitu :
1. Meningkatnya sarana dan prasarana lalu lintas;
 2. Meningkatnya pelayanan pengujian Kendaraan Bermotor.
- c. Pada Misi ketiga terdapat 2 (dua) buah sasaran yaitu :
1. Meningkatnya peran humas sebagai pemberi layanan informasi publik;
 2. Meningkatnya pemahaman aparatur pemerintahan terhadap hak untuk mendapatkan informasi.
- d. Pada Misi keempat terdapat 2 (dua) sasaran yaitu :
1. Terlaksananya pengembangan dan pemeliharaan jaringan komunikasi;
 2. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai media sosialisasi terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

TABEL 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran				
				Pada Tahun ke -				
(1)	(2)	(3)	(4)	1 (5)	2 (6)	3 (7)	4 (8)	5 (9)
1	Meningkatkan pelayanan di bidang perhubungan	Terlaksananya pengembangan dan pemeliharaan sarana transportasi	Jumlah kendaraan yang dipelihara	21 unit	27 unit	28 unit	29 unit	30 unit
		Meningkatnya sarana dan prasarana lalu lintas	Jumlah jenis sarana prasarana yang diadakan	4 jenis	5 jenis	6 jenis	7 jenis	8 jenis
		Meningkatnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor	Persentase wajib uji kendaraan yang melakukan pengujian berkala	92%	94%	96%	98%	100%
2	Meningkatkan pelayanan di bidang komunikasi dan informatika	Meningkatnya peran humas sebagai pemberi layanan informasi publik	Persentase tenaga humas yang telah mengikuti pelatihan kehumasan	60%	70%	80%	90%	100%
		Meningkatnya pemahaman aparatur pemerintahan terhadap hak untuk mendapatkan informasi	Jumlah sosialisasi kehumasan yang dilaksanakan	2 kali	3 kali	4 kali	5 kali	6 kali
		Terlaksananya pengembangan dan pemeliharaan jaringan komunikasi	Jumlah jaringan komunikasi yang dipelihara	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket
		Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai media sosialisasi terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan	Jumlah jenis media sosialisasi yang digunakan	12 jenis	13 jenis	14 jenis	15 jenis	16 jenis

4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Untuk tercapainya pelaksanaan tujuan, diperlukan strategi yang merupakan serangkaian manuver dan seluruh elemen sebagai serangkaian arah dan cakupan jangka panjang organisasi untuk mendapatkan keunggulan melalui konfigurasi sumber daya alam dan lingkungan yang berubah untuk memenuhi harapan semua pihak yang berkepentingan/*stakeholder* (Wikipedia).

Strategi dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang terdiri atas kebijakan, program dan kegiatan.

Adapun kebijakan yang diambil dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember, adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan kenyamanan dan keamanan lalu lintas dan angkutan;
2. Menciptakan sistem informasi komunikasi yang terintegrasi, terpadu, dinamis dan terkoordinasi;
3. Menciptakan keterbukaan informasi dan akses informasi kepada masyarakat dan yang memerlukan.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 RENCANA PROGRAM PRIORITAS

Untuk menentukan program prioritas serta kegiatan berikut pendanaan indikatif yang dibutuhkan, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika mengacu kepada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan untuk lima tahun mendatang, seperti yang telah dibahas pada Bab IV Renstra ini.

Adapun program yang menjadi prioritas selama 5 (lima) tahun ke depan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana, adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Sasaran dari program ini adalah untuk menunjang urusan perhubungan, komunikasi dan informatika sehingga tercipta kelancaran dalam pengadministrasian. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah:

a. Kegiatan penyediaan jasa surat-menyurat

Tujuan kegiatan ini adalah terpenuhinya layanan administrasi perkantoran dengan terselesaikannya urusan surat-menyurat yang ditargetkan sebesar 100%. Jumlah materai, perangko dan pos kilat tercatat adalah indikator yang digunakan.

Untuk jangka menengah, jumlah yang dianggarkan dari tahun 2011 sampai dengan 2016 adalah sebesar Rp.36.600.000,-

b. Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Tujuan kegiatan ini adalah terpenuhinya layanan administrasi perkantoran dengan terpenuhinya kendaraan dinas yang dioperasikan untuk kendaraan dinas dengan target sebanyak 1 unit kendaraan. Indikator yang digunakan adalah jumlah mobil operasional untuk Kepala Dinas.

Untuk jangka menengah, jumlah yang dianggarkan dari tahun 2011 sampai tahun 2016 adalah sebesar Rp.66.000.000,-

c. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Tujuan kegiatan ini adalah terpenuhinya layanan administrasi perkantoran dengan tersedianya kendaraan yang siap dioperasikan yang ditargetkan sebesar 100% dengan indikator jumlah kendaraan yang dipelihara. Sampai dengan akhir tahun 2010 terdapat 2 unit bus, 5 unit kendaraan roda empat, dan 14 unit kendaraan roda dua yang dioperasikan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana.

Jumlah yang dianggarkan dari tahun 2011 sampai dengan 2016 untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp.1.058.650.000,-

d. Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Tujuan dari kegiatan ini adalah terpenuhinya layanan administrasi perkantoran dengan terpenuhinya peralatan kantor yang siap dioperasikan yang ditargetkan sebesar 100%. Indikator yang digunakan adalah jumlah peralatan kantor yang dipelihara.

Total yang dianggarkan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 adalah sebesar Rp.155.100.000,-

e. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor

Tujuan dari kegiatan ini adalah terpenuhinya layanan administrasi perkantoran dengan tersedianya alat tulis kantor untuk mendukung administrasi yang ditargetkan sebanyak 100%. Indikator yang digunakan adalah jumlah alat tulis kantor yang diadakan.

Jumlah yang dianggarkan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 adalah sebesar Rp.566.830.000,-

f. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tujuan dari kegiatan ini adalah terpenuhinya layanan administrasi perkantoran dengan tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk menunjang administrasi dengan target sebanyak 100%. Indikator yang digunakan adalah jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan.

Jumlah yang dianggarkan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 adalah sebesar Rp.141.680.000,-

g. Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tujuan dari kegiatan ini adalah terpenuhinya layanan administrasi perkantoran dengan tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang administrasi dengan target sebanyak 100%. Indikator yang digunakan adalah jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan.

Jumlah yang dianggarkan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 adalah sebesar Rp.72.310.000,-

h. Kegiatan penyediaan bahan logistik kantor

Tujuan dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan bahan logistic kantor yang ditargetkan sebanyak 100% dengan indicator yang digunakan adalah jumlah alat-alat logistic yang diadakan.

Jumlah yang dianggarkan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 adalah sebesar Rp.342.680.000,-

i. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman

Tujuan dari kegiatan ini adalah terpenuhinya layanan administrasi perkantoran dengan terpenuhinya makan dan minum untuk rapat. Jumlah makan minum yang disediakan untuk mendukung kegiatan rapat adalah indikator yang digunakan.

Jumlah yang dianggarkan dari tahun 2011 sampai dengan 2016 adalah sebesar Rp.85.010.000,-

j. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Tujuan dari kegiatan ini adalah terpenuhinya layanan administrasi perkantoran dengan terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan instansi vertical. Indikator yang digunakan adalah jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan dalam satu tahun.

Jumlah yang dianggarkan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 adalah sebesar Rp.1.821.980.000,-

k. Kegiatan penyediaan jasa tenaga administrasi

Tujuan dari kegiatan ini adalah terpenuhinya layanan administrasi perkantoran dengan terpenuhinya penyediaan jasa tenaga administrasi. Indikator yang digunakan adalah jumlah tenaga administrasi yang diadakan.

Untuk tahun 2011 sampai dengan 2016 jumlah yang dianggarkan adalah sebesar Rp.-

l. Kegiatan penyediaan upacara/upacara keagamaan

Tujuan dari kegiatan ini adalah terpenuhinya layanan administrasi perkantoran melalui penyediaan upacara/upacara keagamaan dengan indicator yaitu jumlah upacara/upacara keagamaan atau banten yang diadakan.

Untuk tahun 2011 sampai dengan 2016 jumlah yang dianggarkan adalah sebesar Rp.97.180.000,-

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mampu menunjang kegiatan dalam hal perhubungan dan komunikasi serta informatika merupakan sasaran dari kegiatan ini. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam jangka waktu menengah ini adalah:

a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Tujuan kegiatan ini adalah tersedianya kendaraan dinas/operasional yang siap dioperasikan dengan indikator yang digunakan adalah jumlah kendaraan dinas yang dioperasikan.

Jumlah yang dianggarkan pada tahun 2011 sampai dengan 2016 adalah sebanyak Rp.249.000.000,-

b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Tujuan kegiatan ini adalah tersedianya perlengkapan gedung kantor yang menunjang operasional dengan indicator kegiatan adalah jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan.

Jumlah yang dianggarkan pada tahun 2011 sampai dengan 2016 adalah sebanyak Rp.80.000.000,-

c. Pengadaan peralatan gedung kantor

Tujuan kegiatan ini adalah terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor yang menunjang kegiatan operasional dengan indicator yang digunakan adalah jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan.

Jumlah yang dianggarkan pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 adalah sebanyak Rp.200.000.000,- yang ditebar untuk beberapa periode.

d. Pengadaan Mebeleur

Tujuan kegiatan ini adalah tersedianya mebeleur kantor yang menunjang operasional dengan indikator yang digunakan adalah jumlah mebeleur yang diadakan.

Jumlah yang dianggarkan pada tahun 2011 sampai dengan 2016 adalah sebesar Rp.214.540.000,-

e. Pengadaan jasa sewa kendaraan dinas/opersional

Tujuan kegiatan ini adalah tersedianya pengadaan jasa sewa kendaraan dinas/operasional dengan indicator jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan.

Jumlah yang dianggarkan pada tahun 2011 sampai dengan 2016 adalah sebesar Rp.310.320.000,-

f. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Tujuan kegiatan ini adalah tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan indicator jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan.

Jumlah yang dianggarkan pada tahun 2011 sampai dengan 2016 adalah sebesar Rp. – karena kegiatan ini digabungkan dengan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional untuk service kendaraan.

g. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Tujuan kegiatan ini adalah tersedianya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor dengan indicator jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan.

Jumlah yang dianggarkan untuk tahun 2011 sampai dengan 2016 adalah sebesar Rp.11.500.000,-

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Sasaran dari program ini adalah meningkatkan disiplin aparatur dengan kegiatan yang dilaksanakan yang menunjang program ini adalah:

a. Pengadaan pakaian kerja lapangan

Tujuan dari kegiatan ini adalah tersedianya pakaian kerja dengan indicator sasaran adalah jumlah pakaian kerja yang diadakan dengan target sebanyak 102 stel.

Jumlah yang dianggarkan pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 adalah sebanyak Rp.25.000.000,-

b. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Tujuan dari kegiatan ini adalah tersedianya pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu dengan indicator jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan.

Jumlah yang dianggarkan pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 adalah sebanyak Rp.60.340.000,-

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Sasaran dari program ini adalah meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah:

a. Pendidikan dan pelatihan formal

Tujuan dari kegiatan ini adalah terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal dengan indicator kegiatan adalah jumlah pendidikan dan pelatihan formal yang diadakan dengan target sebanyak 8 kali setiap tahunnya.

Jumlah yang dianggarkan dari tahun 2011 sampai dengan 2016 adalah sebanyak Rp.150.120.000,-

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Sasaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengembangan pelaporan capaian kinerja yang mendukung operasional. Adapun kegiatan yang dilaksanakan yang menunjang program ini adalah:

a. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tujuan dari kegiatan ini adalah terpenuhinya administrasi keuangan, pembukuan dan pelaporan dengan indicator jumlah laporan akhir tahun yang terselesaikan.

Jumlah yang dianggarkan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 adalah sebesar Rp.57.150.000,-

6. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Sasaran dari program ini adalah terbangunnya prasarana dan fasilitas di bidang Perhubungan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah:

a. Kegiatan peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat

Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengelolaan terminal angkutan darat sehingga akan mempermudah dalam hal tata kelola terminal untuk melayani keluar masuknya penumpang dan angkutan guna terciptanya ketertiban, kenyamanan dan keamanan bagi para pengguna terminal

Di Kabupaten Jemberana terdapat 2 terminal angkutan (terminal Gilimanuk, Terminal Negara) dan 1 terminal barang (terminal Kargo). Indikator sasaran adalah jumlah para pengguna terminal yaitu baik berupa orang/penumpang, maupun kendaraan angkutan umum/barang. Target jangka menengah yang dianggarkan dalam kurun waktu 2011 sampai dengan 2016 adalah sebesar Rp.68.000.000,- .

b. Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap prasarana dan fasilitas perhubungan yang dimiliki sehingga dapat tercipta pelayanan data dan informasi yang sangat berguna dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Diharapkan akan mampu menciptakan manajemen yang baik dan terpadu dalam bidang perhubungan

Target jangka menengah yang dianggarkan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.- dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 dengan indikator sasaran berupa jumlah pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan

c. Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Lalu Lintas.

Tujuan dari dilaksanakannya kegiatan tersebut adalah untuk meningkatkan kegiatan sosialisasi terhadap keamanan lalu lintas, dengan sasaran meningkatnya sarana prasarana lalu lintas, dan jumlah sarana prasarana lalu lintas yang diadakan sebagai indikator program.

Dengan adanya peningkatan terhadap sarana dan prasarana lalu lintas, berupa kendaraan operasional dan rambu-rambu lalu lintas, diharapkan menunjang kegiatan sosialisasi, dan mendukung kebutuhan akan penanda jalan untuk keamanan dan keselamatan pengguna jalan dalam berlalu lintas. Target jangka menengah yang diharapkan untuk dicapai pada tahun 2015 adalah 5 (lima) jenis sarana lalu lintas yang terpenuhi berupa kendaraan operasional, traffic light, warning light, counter down, dan komputer, dengan anggaran sebesar Rp.260.260.000,- yang dianggarkan bertahap pada tahun 2011 dan tahun 2014.

d. Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

Tujuan dari dilaksanakannya kegiatan tersebut adalah untuk tahanan perencanaan pembangunan Terminal Kargo di Gilimanuk yaitu dengan pembuatan DED (*Detail Engineering Design*) dengan indikator yang digunakan adalah jumlah paket DED yang diadakan yaitu sebanyak 1 paket.

Jumlah yang dianggarkan adalah untuk tahun 2014 sebesar Rp.225.000.000,-.

7. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Sasaran jangka menengah dalam program ini adalah Meningkatnya prasarana dan fasilitas LLAJ yang direhabilitasi dan dipelihara. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program tersebut adalah :

a. Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan keamanan kendaraan bermotor, dengan sasaran utama meningkatnya rehabilitasi/pemeliharaan terhadap sarana alat pengujian kendaraan bermotor. Jumlah alat uji yang dikalibrasi menjadi indikator sasaran. Dengan dipeliharanya alat pengujian kendaraan bermotor, maka akan dapat dioperasikan secara maksimal untuk mendukung kegiatan pengujian kendaraan bermotor.

Target jangka menengah yang ingin dicapai adalah persentase pemeliharaan sarana sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp.-

b. Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor

Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor, dengan sasaran terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor. Jumlah prasarana yang diadakan menjadi indikator dari sasaran dimaksud. Prasarana yang diharapkan mencakup jalan masuk ke areal gedung pengujian kendaraan, bangunan dan peralatan yang dibutuhkan.

Hal ini untuk mendukung kenyamanan dan keamanan bagi pemberi pelayanan dan juga bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

Target jangka menengah yang ingin dicapai adalah pemeliharaan jalan masuk balai pengujian dan pemeliharaan gedung pengujian, dengan anggaran

yang dialokasikan sebesar Rp.81.940.000,- yang dilaksanakan bertahap pada tahun 2013 dan 2015.

c. Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan lalu lintas angkutan darat, dengan sasaran terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan. Di Kabupaten Jembrana terdapat 3 (tiga) terminal dan 1 (satu) pelabuhan, Tiga terminal yang dimaksud adalah terminal Gilimanuk, Terminal Negara dan Terminal Kargo.

Jumlah terminal yang dipelihara menjadi indikator kinerja terhadap kegiatan tersebut. Adapun kebutuhan akan pendanaan terhadap rehabilitasi pelabuhan Gilimanuk menjadi sangat penting akibat kerusakan yang cukup serius yang dialami sehingga memerlukan penanganan yang cepat, untuk memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi penumpang, angkutan dan petugas terminal itu sendiri.

Target jangka menengah yang ingin dicapai adalah pemeliharaan 3 (tiga) buah terminal dengan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.445.000.000,-.

d. Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan halte

Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan lalu lintas bagi masyarakat dan untuk ketertiban berlalu lintas, dengan sasaran terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan halte. Jumlah halte yang dipelihara menjadi tolok ukur keberhasilan kegiatan tersebut.

Hingga akhir tahun 2010 terdapat 47 halte yang tersebar di wilayah Kabupaten Jembrana. Dengan disediakannya halte yang representatif, maka memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang menggunakan jasa

transportasi umum, dan sebagai tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang, sehingga tercipta ketertiban berlalu lintas. Namun sampai saat ini, pemanfaatan halte dirasakan belum optimal, sehingga masih terlihat kendaraan angkutan umum yang menaikkan dan menurunkan penumpang di hampir setiap tempat sesuai keinginan, sehingga mengganggu pengguna jalan yang lain.

Target jangka menengah yang ingin dicapai adalah pemeliharaan 47 unit halte dengan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.76.530.000,- yang dilaksanakan bertahap selama lima tahun.

e. Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan traffic light dan warning light

Pemeliharaan terhadap traffic light dan warning light sangat signifikan untuk dilakukan mengingat fungsinya yang penting, untuk mencapai tujuan meningkatnya keamanan lalu lintas bagi pengguna jalan. Terlaksananya reabilitas/pemeliharaan traffic light dan warning light menjadi sasaran yang diharapkan, dengan jumlah traffic light, warning light, dan counter down yang dipelihara sebagai indikator kinerja.

Target jangka menengah yang diharapkan untuk dipenuhi adalah sejumlah 33 unit traffic light, warning light, dan counter down, dengan anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp.609.500.000,- yang direncanakan bertahap selama kurun waktu lima tahun.

8. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Sasaran jangka menengah dalam program ini adalah meningkatnya pelayanan angkutan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program tersebut adalah :

a. Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang guna mewujudkan transportasi yang layak, aman bagi penumpang dan pengguna jalan. Jumlah buku-buku dan sarana pendukung uji kelayakan transportasi merupakan indikator sasaran kegiatan ini.

Target jangka menengah yang dianggarkan adalah sebesar Rp.- yang dilaksanakan bertahap dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016.

b. Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan keamanan lalu lintas, dengan sasaran terlaksananya kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya. Kegiatan pengendalian disiplin sering disebut juga dengan kegiatan wahana tata nugraha, yang merupakan kegiatan tahunan rutin yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk menilai sarana dan prasarana transportasi darat perkotaan, termasuk di dalamnya adalah transportasi darat (sarana dan prasarana), angkutan umum, lalu lintas dan manajemen rekayasa (penempatan rambu sesuai peruntukannya).

Target yang ingin dicapai adalah terlaksananya kegiatan WTN dengan alokasi anggaran sebesar Rp.138.690.000,- yang dialokasikan bertahap tahun 2011 sampai dengan tahun 2016

c. Kegiatan penciptaan disiplin pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kenyamanan berlalu lintas dengan menciptakan kebersihan dan kenyamanan di lingkungan terminal dan pengujian kendaraan bermotor. Adapun sasaran kegiatan tersebut adalah terlaksananya pemeliharaan kebersihan di lingkungan

terminal, dengan jumlah tenaga kebersihan dan keamanan yang menjadi indikator kinerja.

Target jangka menengah yang ingin dicapai adalah terpenuhinya kebutuhan 20 orang tenaga kebersihan dan keamanan, dengan total anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp.1.745.740.000,- yang dilaksanakan bertahap selama lima tahun.

d. Kegiatan penciptaan layanan cepat, tepat, murah dan mudah

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan transportasi, dengan sasaran terlaksananya pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah. Jumlah kendaraan angkutan umum yang dioperasikan menjadi tolak ukur utama kinerja.

Kegiatan ini diharapkan menyentuh masyarakat dan pegawai negeri sipil, berupa layanan transportasi yang murah dan mudah, termasuk ketersediaan transportasi darat bagi masyarakat dalam pelaksanaan event kedaerahan seperti pelaksanaan HUT Kota Negara, dan parade pembangunan dan budaya daerah.

Target yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun adalah beroperasinya secara maksimal 4 (empat) unit bus yang dimiliki Pemkab Jembrana dengan kebutuhan penganggaran sebesar Rp.799.670.000,-

e. Kegiatan pengumpulan analisis data base pelayanan jasa angkutan

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan keamanan lalu lintas dengan menganalisa kepadatan transportasi di kabupaten Jembrana termasuk di dalamnya untuk mendapatkan data dan gambaran terhadap sarana lalu lintas di Jembrana dengan memanfaatkan teknologi pemetaan posisi transportasi.

Sasaran kegiatan yaitu terlaksananya pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan, dengan target sarana pemetaan berupa GPS, walking meter, stop watch, dan traffic counter. Adapun anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp. 76.750.000,- yang dilaksanakan bertahap dari tahun 2011 sampai dengan 2016.

f. Kegiatan fasilitasi perijinan di Bidang Perhubungan

Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan perijinan dengan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan berupa blangko, alat cetak dan dokumen yang terkait. Sasaran kegiatan adalah meningkatnya fasilitasi perijinan di bidang perhubungan, dengan jumlah baku dan blangko penunjang kegiatan perijinan yang diadakan menjadi tolok ukur kinerja.

Terdapat 15 (lima belas) jenis dokumen yang dibutuhkan dalam pengurusan perijinan dengan anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp.726.520.000,- yang dilaksanakan bertahap selama kurun waktu lima tahun.

g. Kegiatan sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan keamanan lalu lintas, dengan sasaran meningkatnya sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan dengan target pelaksanaan 9 (sembilan) kali se bulan atau 108 kali dalam setahun, yang dilakukan bagi pengguna jalan, sopir angkutan, dan pengusaha angkutan, dengan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.665.290.000,- yang dialokasikan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016.

h. Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan teladan

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan keamanan lalu lintas melalui peningkatan pemahaman para sopir, juru mudi dan awak kendaraan angkutan. Kegiatan ini memberikan penyegaran dan penghargaan bagi mereka pelaku pelayanan transportasi darat, yang merupakan kegiatan rutin tahunan yang berskala nasional.

Target yang ini dicapai adalah adanya pengiriman perwakilan peserta ke tingkat provinsi hingga nasional. Adapun besaran anggaran yang dialokasikan adalah Rp.131.380.000,- yang dialokasikan dari tahun 2011 sampai tahun 2016.

i. Peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas)

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperingati perayaan hari perhubungan nasional (Harhubnas) melalui kegiatan pelaksanaan lomba-lomba baik di tingkat I (Propinsi) maupun di tingkat II (Kabupaten).

Jumlah yang dianggarkan untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 adalah sebesar Rp.52.350.000,-

9. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Sasaran jangka menengah dari program ini adalah untuk pengadaan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program tersebut adalah:

a. Pembangunan gedung terminal

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk pengadaan pembangunan gedung terminal yang mana untuk tahun 2015 direncanakan akan dibangun Terminal Kargo di Gilimanuk.

Jumlah yang dianggarkan untuk tahun 2015 adalah sebesar Rp.60.000.000.000,-

b. Pembangunan halte bus, taxi, gedung terminal

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk pembangunan halte bus, taxi, gedung terminal dengan indicator jumlah halte yang diadakan.

Jumlah yang dianggarkan untuk tahun 2011 sampai tahun 2016 adalah sebesar Rp.1.449.500.000,-

10. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Sasaran jangka menengah dari program ini adalah untuk menciptakan keamanan lalu lintas. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program tersebut adalah:

a. Kegiatan Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas

Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan keamanan lalu lintas, dengan sasaran terlaksananya pengadaan rambu-rambu lalu lintas. Rambu-rambu lalu lintas merupakan alat perlengkapan jalan dalam bentuk tertentu yang memuat lambing, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan di antara, yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan.. Contohnya rambu peringatan terhadap tikungan tajam, jalan licin, dan lain sebagainya.

Target jumlah rambu untuk dipasang pada jalur lalu lintas di kabupaten jembrana sebanyak 463 buah dengan anggaran sebesar Rp.439.480.000,- yang dilaksanakan secara bertahap selama lima tahun.

b. Kegiatan Pengadaan Marka Jalan

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan keamanan lalu lintas, dengan sasaran terlaksananya pengadaan marka jalan. Marka jalan merupakan tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambing yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.

Target jangka menengah terhadap panjang marka jalan yang diadakan selama kurun waktu lima tahun adalah sebesar 1.755m² dengan total anggaran sebesar Rp.380.000.000,-

c. Kegiatan Pengadaan Pagar Pengaman Jalan

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan keamanan dalam berlalu lintas, dengan sasaran terlaksananya pengadaan pagar pengaman jalan. Pagar pengaman jalan berfungsi untuk memberikan batasan terhadap daerah yang rawan, curam dan jembatan sebagai pengaman bagi pengguna jalan, untuk menghindari adanya kendaraan yang keluar jalur dari badan jalan.

Target jangka menengah terhadap panjang pagar pengaman jalan yang diadakan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebesar 160 meter dengan besaran anggaran sebesar Rp.-

d. Pengadaan pengendali isyarat lalu lintas

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan keamanan dalam berlalu lintas, dengan terlaksananya pengadaan pengendali isyarat lalu lintas. Indikator untuk kegiatan ini adalah jumlah pengendali isyarat lalu lintas yang diadakan.

Jumlah yang dianggarkan untuk tahun 2011 sampai dengan 2016 adalah Rp.-

e. Peningkatan kebutuhan pemeliharaan dan pengawasan lalu lintas

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan keamanan dalam berlelu lintas, dengan terlaksananya peningkatan kebutuhan pemeliharaan dan pengawasan lalu lintas.

Jumlah yang dianggarkan untuk tahun 2011 sampai dengan 2016 adalah Rp.-

11. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Sasaran jangka menengah dari program ini adalah untuk meningkatkan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program tersebut adalah:

a. Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor

Tujuan dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengaspalan pintu keluar masuk pengujian kendaraan bermotor dengan indicator kegiatan adalah jumlah pengaspalan jalan pintu keluar masuk pengujian yang diadakan dengan target sebanyak 1 paket.

Jumlah yang dianggarkan pada tahun 2011 sampai dengan 2016 adalah sebanyak Rp.250.000.000,-

b. Kegiatan pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor

Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor, dengan sasaran meningkatnya pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor. Alat pengujian kendaraan bermotor berfungsi untuk menentukan kelayakan terhadap kendaraan bermotor angkutan untuk beroperasi. Sementara alat pengujian yang dimiliki masih bersifat manual, sehingga perlu adanya pengadaan alat pengujian kendaraan yang lebih baik.

Target jumlah alat pengujian kendaraan yang diadakan selama kurun waktu lima tahun adalah sebanyak 11 unit dengan total anggaran sebesar Rp.1.487.320.000,- yang dilaksanakan secara bertahap.

c. Kegiatan pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor

Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor melalui survey ke lapangan sehingga tingkat kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor menjadi meningkat. Indikator yang digunakan adalah jumlah pelaksanaan uji petik yang diadakan selama satu tahun.

Jumlah anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp.- yang dilaksanakan dari tahun 2013 sampai dengan 2016.

12. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Sasaran jangka menengah dari program ini adalah untuk mengembangkan komunikasi informasi dan media massa di Kabupaten Jembrana. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program tersebut adalah :

a. Kegiatan pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan komunikasi dan informasi, dengan sasaran terlaksananya pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi. Jaringan komunikasi dan informasi merupakan hal penting untuk dibangun mengingat era pembangunan dan pemerintahan yang sudah memanfaatkan teknologi informasi komunikasi untuk menunjang kegiatan.

Target jangka menengah jumlah layanan komunikasi, informasi dan media massa yang dipelihara adalah 2 paket dengan total anggaran sebesar Rp.3.890.520.000,-

b. Kegiatan pembinaan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pelayanan komunikasi informasi dengan bekerjasama dengan pihak ketiga untuk mengadakan audit terhadap pelayanan publik dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi yang dimiliki, sehingga memenuhi standar mutu pelayanan.

Target jangka menengah dari audit yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun adalah 2 paket dengan total anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp. 169.300.000,- yang dilaksanakan secara bertahap.

c. Pengadaan alat studio dan komunikasi

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan komunikasi informasi, dengan sasaran terpenuhinya kebutuhan alat studio dan komunikasi. Alat-alat studio dan komunikasi yang dimaksud berupa kamera digital, kamera video, komputer, printer, serta alat-alat pendukung kegiatan yaitu pakaian kerja, barang cetakan penggandaan, barang dokumentasi, dan alat komunikasi lainnya.

Target jangka menengah yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun adalah jumlah pengadaan alat studio dan komunikasi sebanyak 6 paket dengan total anggaran sebesar Rp.175.000.000,- yang dilaksanakan secara bertahap.

d. Kegiatan pengkajian dan pengembangan sistem informasi

Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pelayanan komunikasi informasi, dengan sasaran terlaksananya kegiatan pengkajian dan pengembangan sistem informasi.

Target yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun adalah jumlah sistem informasi dan komunikasi yang dikaji dan dikembangkan yaitu sebanyak 1 paket dengan total anggaran sebesar Rp.440.000.000,- yang dilaksanakan bertahap pada tahun 2011, tahun 2013 dan tahun 2015.

e. Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk pembuatan kajian dalam rangka perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi dengan indicator jumlah kajian yang dilaksanakan.

Jumlah yang dianggarkan untuk tahun 2011 sampai dengan 2016 adalah sebesar Rp.452.250.000,-

f. Kegiatan sosialisasi pembangunan dan kebijakan pemerintah daerah

Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pelayanan komunikasi informasi, dengan sasaran meningkatnya kegiatan sosialisasi pembangunan dan kebijakan pemerintah daerah. Sosialisasi ini meliputi kegiatan pemasangan baliho, pembuatan spanduk informasi, pamflet, sticker, sosialisasi kepada masyarakat dalam bentuk tatap muka, dan lain sebagainya.

Target yang ingin dicapai adalah jumlah sosialisasi pembangunan dan kebijakan pemkab yang dilaksanakan yaitu sebanyak 30 paket dengan total anggaran sebesar Rp.6.549.990.000,-

12. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi

Tujuan jangka menengah dari program ini adalah terlaksananya pengkajian dan penelitian di bidang komunikasi dan informasi sehingga mampu meningkatkan peran komunikasi dan informasi beserta produk turunannya dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang program ini adalah:

a. Kegiatan pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

Tujuan dari kegiatan ini adalah terlaksananya penelitian bidang informasi dan komunikasi dengan target sebesar 1 paket untuk meningkatkan pelayanan infokom kepada masyarakat.

Jumlah yang dianggarkan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 adalah sebesar Rp.103.810.000,-

13. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

Tujuan jangka menengah dari program ini adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia pada Pemkab Jembrana dalam hal IT dan kehumasan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kegiatan pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi

Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pelayanan komunikasi dan informasi, dengan sasaran terlaksananya pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi. Hal ini untuk meningkatkan pemahaman terhadap pentingnya membangun jaringan komunikasi dan membuka akses informasi untuk mewujudkan stabilitas pembangunan dan pemerintahan disamping untuk memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan.

Target yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun adalah 2 paket pelatihan pembangunan jaringan komunikasi dan informasi, serta pelatihan kehumasan, dengan total anggaran sebesar Rp.-

14. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kerjasama antara pemerintah dengan media massa dalam hal informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program tersebut adalah :

a. Kegiatan penyebaran informasi pembangunan daerah

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan komunikasi informasi khususnya dalam hal penyebaran informasi pembangunan daerah yang telah dilaksanakan, dengan sasaran meningkatnya penyebaran informasi pembangunan daerah.

Target yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun adalah jumlah penyebaran informasi pembangunan daerah sebanyak 302 kali dalam satu tahun, yang dilaksanakan secara bertahap (3 kali pameran pembangunan dan 25 kali kegiatan MCAP per bulan), dengan total anggaran sebesar Rp.709.970.000,-

b. Kegiatan penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintah daerah

Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pelayanan komunikasi informasi khususnya dalam hal kehumasan, dan kerjasama dengan pihak media massa, dengan sasaran meningkatnya penyebaran informasi pemerintah daerah.

Target yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun adalah 2 paket dengan total anggaran sebesar Rp.2.830.410.000,-

- c. Kegiatan penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan komunikasi dan informasi yaitu yang bersifat penyuluhan kepada masyarakat dengan demikian terdapat kedekatan dalam penyampaian informasi melalui tatap muka.

Target yang akan dicapai dalam jangka menengah adalah sebanyak satu paket sebesar Rp.- dari tahun 2013 sampai dengan 2016.

TABEL 5.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEMBRANA

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5		Tahun -6		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)		
Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran	Terlaksananya pengadministrasian perkantoran yang menunjang kegiatan	Persentase laporan yang terselesaikan	1 07 1 07 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase laporan yang terselesaikan	100%	100%	727.42	100%	641.52	100%	720.95	100%	718,951,15	100%	803.763,6	90%	782,615	100%	850.11	Sekretariat	Kab. Jembrana
Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya perlengkapan pos sebanyak 3 paket	Jumlah perlengkapan pos yang diadakan	1 07 1 07 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah perlengkapan pos yang diadakan	3 paket	3 paket	6.1	3 paket	6.2	3 paket	5.6	3 jenis	5,6	3 jenis	5.6	2 jenis	5.81	3 jenis	6.6	Sekretariat	Kab. Jembrana
Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya kendaraan yang dioperasikan sebanyak 1 unit	Jumlah kendaraan yang dioperasikan	1 07 1 07 01 01	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah kendaraan yang dioperasikan	1 unit	1 unit	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 unit	66	Sekretariat	Kab. Jembrana
Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya kendaraan yang dipelihara sebanyak 21 unit	Jumlah kendaraan yang dipelihara	1 07 1 07 01 01	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara	21 unit	21 unit	88.22	21 unit	88.22	21 unit	210.92	21 unit	202.806	3 jenis	271.212,5	7 unit kendaraan roda 4, 20 unit kendaraan	268.25	21 unit	245.4	Sekretariat	Kab. Jembrana
Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran	Terpeliharanya peralatan untuk operasional kantor sebanyak 1 paket	Jumlah peralatan yang dipelihara	1 07 1 07 01 01	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan yang dipelihara	1 paket	1 paket	6.35	1 paket	6.35	1 paket	30.85	1 paket	33,7	1 paket	39,7	10 jenis	42,7	1 paket	40,78	Sekretariat	Kab. Jembrana
Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya alat tulis kantor sebanyak 1 paket	Jumlah alat tulis kantor yang diadakan	1 07 1 07 01 01	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang diadakan	1 paket	1 paket	71.33	1 paket	71.33	1 paket	99.66	1 paket	98,040,25	1 paket	80.000,8	2 jenis	80.753.1	1 paket	118.63	Sekretariat	Kab. Jembrana
Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk operasional kantor sebanyak 2 paket	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	1 07 1 07 01 01	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	2 paket	2 paket	21.67	2 paket	21.67	2 paket	23.97	2 paket	23,974,9	2 paket	31.613.3	2 jenis	40.639	2 paket	26.4	Sekretariat	Kab. Jembrana
Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan yang diadakan	1 07 1 07 01 01	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan yang diadakan	-	-	-	-	-	1 paket	21	1 paket	15,5	5 jenis	76.5	5 jenis	50.2	1 paket	18.76	Sekretariat	Kab. Jembrana

Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya bahan logistik kantor yang diadakan sebanyak 3 paket	Jumlah bahan logistik (BBM,alat listrik dan banten) yang diadakan	1	07	1	07	01	01	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik (BBM,alat listrik dan banten) yang diadakan	2 paket	3 paket	171.34	3 paket	171.34	3 paket	0	3 paket	0	0	0	-	-	3 paket	0	Sekretariat	Kab. Jembrana
Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya makan dan minum untuk kegiatan rapat sebanyak 1330 kotak	Jumlah makan dan minum yang disediakan untuk mendukung kegiatan rapat	1	07	1	07	01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan dan minum yang disediakan untuk mendukung kegiatan rapat	1920 kotak	1330 kotak	3.99	1330 kotak	3.99	1330 kotak	15.22	1330 kotak	18,672	2 jenis	23.695	2 jenis	18,829	6650 kotak	22.39	Sekretariat	Kab. Jembrana
Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran	Terlaksananya perjalanan dinas dalam satu tahun sebanyak 2 paket	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan dalam 1 tahun	1	07	1	07	01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan dalam 1 tahun	2 paket	2 paket	292.42	2 paket	272.42	2 paket	293.01	2 paket	297,558	2 paket	252.342	2 paket	252,334	2 paket	343.61	Sekretariat	Kab. Jembrana
Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya tenaga administrasi untuk operasional sebanyak 6 orang	Jumlah tenaga administrasi yang diadakan	1	07	1	07	01	01	19	Penyediaan jasa tenaga administrasi	Jumlah tenaga administrasi yang diadakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat	Kab. Jembrana	
Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan Upakara/banten	Jumlah Upakara/banten yang diadakan	1	07	1	07	01	01	23	Penyediaan Upakara/Upacara Keagamaan	Jumlah Upakara/banten yang diadakan	3 paket	-	-	-	-	3 paket	21	3 paket	23,1	3 paket	23.1	3 jenis	23,100	3 paket	343.01	Sekretariat	Kab. Jembrana
Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan perkantoran	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	1	07	1	07	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya peralatan gedung kantor	-	-	-	3 jenis	255	1 unit	75.4	1 jenis	39,197,5	2 jenis	22.793	90%	48,793	5 jenis	320.02	Sekretariat	Kab. Jembrana
Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya kendaraan dinas yang dioperasikan sebanyak 2 unit	Jumlah kendaraan dinas yang dioperasikan	1	07	1	07	01	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dioperasikan	-	-	-	2 unit	100	-	-	1 unit	17	0	0	2 unit	34	2 unit	66	Sekretariat	Kab. Jembrana
Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya perlengkapan gedung kantor sebanyak 4 jenis	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	1	07	1	07	01	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	-	-	-	4 jenis	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat	Kab. Jembrana

Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur dari 3 jenis pada tahun 2012 menjadi 5 jenis pada tahun 2016	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	1	07	1	07	01	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	-	-	-	3 jenis	50	-	-	-	-	0	0	-	-	2 jenis	75	Sekretariat	Kab. Jembrana
Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya mebeleur kantor sebanyak 5 jenis	Jumlah mebeleur yang diadakan	1	07	1	07	01	02	10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	-	-	-	5 jenis	25	-	-	1 jenis	19,75	1 jenis	20	2 unit	12	1 jenis	88.94	Sekretariat	Kab. Jembrana
Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya kendaraan dinas yang dioperasionalkan	Jumlah kendaraan yang diadakan	1	07	1	07	01	02	12	Jasa Sewa Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang diadakan	-	-	-	-	-	1 unit	72	0	0	0	0	-	-	1 unit	87.12	Sekretariat	Kab. Jembrana
Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur	tersedianya kendaraan dinas untuk operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara	1	07	1	07	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat	Kab. Jembrana
Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur	terpeliharanya gedung kantor untuk kelancaran operasional perkantoran	Jumlah perlengkapan kebutuhan kantor yang diadakan	1	07	1	07	01	02	26	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kebutuhan kantor yang diadakan	-	-	-	2 unit	3,34	2 unit	2.447.5	2 unit	2.793	2 jenis	2.793	2 unit	2.96	2 unit	2.96	Sekretariat	Kab. Jembrana
Meningkatkan disiplin aparatur	Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur	Jumlah pakaian kerja yang diadakan	1	07	1	07	01	03	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	-	-	-	1 paket	25	1 paket	14	1 paket	14	1 paket	14	90%	45,500	1 paket	16.94	Sekretariat	Kab. Jembrana
Meningkatkan disiplin aparatur	Tersedianya pakaian kerja sebanyak 102 stel	Jumlah pakaian kerja yang diadakan	1	07	1	07	01	03	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja yang diadakan	-	-	-	1 paket	25	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	25	Sekretariat	Kab. Jembrana
	tersedianya pakaian dinas khusus hari -hari tertentu	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	1	07	1	07	01	03	05	Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	-	-	-	1 paket	14	1 paket	14	1 paket	14	2 jenis	45.5	1 paket	16.94	1 paket	16.94	Sekretariat	Kab. Jembrana
Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal yang diadakan	1	07	1	07	01	05	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal yang diadakan	-	-	-	8 kali	50.12	-	-	-	-	-	-	-	-	8 kali	50	Sekretariat	Kab. Jembrana
Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal sebanyak 8 kali	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal yang diadakan	1	07	1	07	01	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal yang diadakan	-	-	-	8 kali	50.12	-	-	-	-	-	-	-	-	8 kali	50	Sekretariat	Kab. Jembrana

Meningkatkan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terselesaikannya laporan capaian kinerja	Jumlah laporan yang terselesaikan	1	07	1	07	01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terselesaikannya pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2 item	2 item	8.3	2 item	8.4	2 item	11.83	2 item	11.826	2 item	12.016	90%	12,182	2 item	8.4	Sekretariat	Kab. Jembrana	
Meningkatkan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terselesaikannya laporan capaian kinerja sebanyak 2 item	Jumlah laporan yang terselesaikan	1	07	1	07	01	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan yang terselesaikan	2 item	2 item	8.3	2 item	8.4	2 item	11.83	2 item	11.826	2 item	12.016	2 item	12,182	2 item	8.4	Sekretariat	Kab. Jembrana
Meningkatkan pelayanan di bidang perhubungan	Meningkatnya sarana dan prasarana lalu lintas	Persentase pemasangan rambu	1	07	1	07	01	15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase pemasangan rambu	-	40%	244.31	-	-	-	-	-	70%	225	-	-	-	80%	50.95	Bidang Perhubungan	Kab. Jembrana	
Meningkatkan sosialisasi keamanan lalu lintas	Meningkatnya sarana prasarana lalu lintas dari 4 jenis pada tahun 2011 menjadi 5 jenis pada tahun 2017	Jumlah perencanaan pembangunan yang diselesaikan	1	07	1	07	01	15	01	Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah kajian yang diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	225	-	-	-	-	-	Bidang Perhubungan	Kab. Jembrana	
Meningkatkan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Meningkatnya jumlah pengguna terminal dalam satu tahun dari 2 juta org/brg/kend pada tahun 2013 menjadi 6 juta org/brg/kend di tahun 2016	Jumlah pengguna terminal dalam 1 tahun	1	07	1	07	01	15	07	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	Jumlah pengguna terminal dalam 1 tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 juta org/brg/kend	35	Bidang Perhubungan	Kab. Jembrana	
Meningkatkan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Terlaksananya monitoring dan pelaporan sebanyak 1 item	Jumlah pelaporan yang dihasilkan	1	07	1	07	01	15	08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah pelaporan yang dihasilkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Perhubungan	Kab. Jembrana	
Meningkatkan sosialisasi keamanan lalu lintas	Meningkatnya sarana prasarana lalu lintas dari 4 jenis pada tahun 2011 menjadi 5 jenis pada tahun 2016	Jumlah sarana prasarana lalu lintas yang diadakan	1	07	1	07	01	15	09	Peningkatan Sarana Prasarana Lalu Lintas	Jumlah sarana prasarana lalu lintas yang diadakan	-	4 jenis	244.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 jenis	15.95	Bidang Perhubungan	Kab. Jembrana

Meningkatkan pelayanan di bidang perhubungan	Terlaksananya pengembangan dan pemeliharaan sarana transportasi	- jumlah terminal yang dipelihara - rasio ijin trayek	1	07	1	07	01	16	01	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	- Terpeliharanya terminal angkutan - rasio ijin trayek	- 3 buah terminal - 0.014%	- 3 buah terminal ; 0.015%	104.6	- 3 buah terminal ; 0.017%	89.6	- 3 buah terminal ; 0.019%	174.6	- 3 buah terminal ; 0.020%	212,25	- 3 buah terminal ; 0.022%	123.5	90%	389.5	- 3 buah terminal ; 0.022%	340.46	Bidang Perhubungan	Kab. Jembrana
Meningkatkan keamanan kendaraan bermotor	Meningkatnya rehabilitasi/ pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor dari 96% pada tahun 2013 menjadi 100% pada tahun 2016	Persentase wajib uji kendaraan yang melakukan pengujian berkala	1	07	1	07	01	16	01	Kegiatan Rehabilitasi/ pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Persentase wajib uji kendaraan yang melakukan pengujian berkala	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	25	1 paket	27.5	-	-	-	Bidang Perhubungan	Kab. Jembrana
Meningkatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor	Terlaksananya rehabilitasi/ pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor sebanyak 1 paket	Jumlah prasarana balai pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara	1	07	1	07	01	16	02	Kegiatan Rehabilitasi/ pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah prasarana balai pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara	1 paket	-	-	-	-	-	-	1 paket	20.936	-	-	1 paket	158	-	-	Bidang Perhubungan	Kab. Jembrana
Meningkatkan pelayanan lalu lintas	Terlaksananya rehabilitasi/ pemeliharaan terminal/ pelabuhan sebanyak 3 buah	Jumlah terminal yang dipelihara	1	07	1	07	01	16	04	Kegiatan Rehabilitasi/ pemeliharaan terminal pelabuhan	Jumlah terminal yang dipelihara	3 buah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 unit	90	3 buah	225	Bidang Perhubungan	Kab. Jembrana
Meningkatkan pelayanan lalu lintas	Terlaksananya rehabilitasi/ pemeliharaan halte sebanyak 47 buah	Jumlah halte yang dipelihara	1	07	1	07	01	16	05	Kegiatan Rehabilitasi/ pemeliharaan halte	Jumlah halte yang dipelihara	47 buah	47 buah	15	-	-	-	47 buah	30	8 unit	10	-	-	-	47 buah	44.03	Bidang Perhubungan	Kab. Jembrana
Meningkatkan keamanan lalu lintas	Terlaksananya rehabilitasi/ pemeliharaan traffic light dan warning light sebanyak 29 unit pada tahun 2011 menjadi 33 unit pada tahun 2016	Jumlah traffic light, warning light dan counter down yang dipelihara	1	07	1	07	01	16	06	Kegiatan Rehabilitasi/ pemeliharaan traffic light dan warning light	Jumlah traffic light, warning light dan counter down yang dipelihara	29 unit	29 unit	89.6	29 unit	89.6	31 unit	144.6	31 unit	181.314	7 traffic light, 29 warning light	98.5	8 unit traffic light dan 35 unit warning light	114	33 unit	104.44	Bidang Perhubungan	Kab. Jembrana
Meningkatkan pelayanan di bidang perhubungan	Terlaksananya pengembangan dan pemeliharaan sarana transportasi	Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis yang difungsikan	1	07	1	07	01	17		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Terfungsikannya pelabuhan laut/udara/terminal bis	5	5	459.81	5	422.4	5	982.07	5	902.421.7	1.249.05 0.55	95%	1,549,070	5	796.37	Bidang Perhubungan	Kab. Jembrana	

	Terlaksananya Lomba Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan	Jumlah Lomba pemilihan pelajar pelopor keselamatan Lalu Lintas dan angkutan jalan yang dilaksanakan	1	07	1	07	01	17	02	Kegiatan Peningkatan disiplin Masyarakat menggunakan angkutan	Pelaksanaan lomba pemilihan pelajar pelopor keselamatan Lalu Lintas dan angkutan jalan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 kali	15						
	Terlaksananya Temu wicara Pengelola Angkutan Umum guna meningkatkan keselamatan penumpang	Jumlah tatap muka yang dilaksanakan	1	07	1	07	01	17	03	Kegiatan Temu Wicara Pengelola Angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang	Pelaksanaan tatap muka dengan para pengusaha angkutan orang dan barang terkait isu-isu strategis permasalahan transportasi jalan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 kali	10						
Meningkatkan pelayanan angkutan	Tersedianya sarana pendukung uji kelayakan sebanyak 2 jenis	Jumlah sarana pendukung uji kelayakan yang diadakan	1	07	1	07	01	17	04	Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	Jumlah sarana pendukung uji kelayakan yang diadakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Perhubungan	Kab. Jembrana
Meningkatkan keamanan lalu lintas	Terlaksananya kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya sebanyak 1 kali	Jumlah kegiatan WTN yang dilaksanakan	1	07	1	07	01	17	05	Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	Jumlah kegiatan WTN yang dilaksanakan	1 kali	1 kali	13.31	1 kali	11	1 kali	27.45	1 kali	26.265	1 kali	43.129.7	1 kali	25	1 kali	31.78							Bidang Perhubungan	Kab. Jembrana	
Meningkatkan kenyamanan berlalu lintas	Terlaksananya Penataan Tempat - tempat Pemberhentian angkutan umum	Jumlah masterplan penataan tempat pemberhentian angkutan barang di rest area Rambut siwi yang tersusun	1	07	1	07	01	17	08	Kegiatan Penataan Tempat-tempat pemberhentian angkutan umum	Penyusunan masterplan penataan tempat pemberhentian angkutan barang di rest Area Rambut siwi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	90					Bidang Perhubungan	Kab. Jembrana	
Meningkatkan kenyamanan berlalu lintas	Terlaksananya pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal sebanyak 17 orang pada tahun 2011 menjadi 20 orang pada tahun 2016	Jumlah tenaga kebersihan dan keamanan	1	07	1	07	01	17	09	Kegiatan Penciptaan Disiplin Pemeliharaan Kebersihan di Lingkungan Terminal	Jumlah tenaga kebersihan di terminal	13 orang	17 orang	224.73	20 orang	247.21	20 orang	358.94	20 orang	407.892.25	3 jenis	432.340.85	2 paket	475.5	20 orang	255							Bidang Perhubungan	Kab. Jembrana	
Meningkatkan pelayanan transportasi	Meningkatnya pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah sebanyak 2 unit	Jumlah kendaraan angkutan umum yang diopersikan	1	07	1	07	01	17	10	Kegiatan Penciptaan Layanan Cepat, tepat, Murah dan Mudah	Jumlah kendaraan angkutan umum yang diopersikan	6 unit	2 unit	88.57	-	-	2 unit	192.64	2 unit	156.636.5	3 paket	324.832	1 paket	357.3	2 unit	189.53							Bidang Perhubungan	Kab. Jembrana	

Meningkatkan keamanan lalu lintas	Terlaksananya pengumpulan dan analisis database pelayanan jasa angkutan sebanyak 1 paket	Jumlah alat-alat survey yang diadakan	1	07	1	07	01	17	11	Kegiatan Pengumpulan dan Analisis database Pelayanan Jasa Angkutan	Jumlah alat-alat survey yang diadakan	1 paket	-	-	1 paket	5.61	1 paket	28	1 paket	9.710.95	1 paket	23.422.6	1 paket	25.7	1 paket	11.75	Bidang Perhubungan	Kab. Jembrana
	Terlaksananya pengembangan sarana dan prasarana pelayanan angkutan	Jumlah kajian rencana pemberhentian subsidi tarif angkutan umum bagi para pelajar di wilayah Kabupaten Jembrana	1	07	1	07	01	17	12	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan angkutan	penyusunan kajian rencana pemberian subsidi tarif angkutan umum bagi para pelajar di wilayah kabupaten jembrana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 paket	50	-	-	Bidang Perhubungan	Kab. Jembrana	
Meningkatkan pelayanan perijinan	Meningkatnya fasilitasi perijinan di bidang perhubungan sebanyak 15 jenis	Jumlah bahan baku dan blangko penunjang kegiatan perijinan yang diadakan	1	07	1	07	01	17	13	Kegiatan Fasilitasi Perijinan di Bidang Perhubungan	Jumlah bahan baku dan blangko penunjang kegiatan perijinan yang diadakan	15 jenis	15 jenis	112	15 jenis	112	15 jenis	153.7	15 jenis	124.82	2 jenis	188.42	10 jenis	197.7	15 jenis	112	Bidang Perhubungan	Kab. Jembrana
Meningkatkan keamanan lalu lintas	Meningkatnya sosialisasi/ penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan dari 96 kali	Frekuensi sosialisasi/ penyuluhan ketertiban LLA	1	07	1	07	01	17	14	Kegiatan Sosialisasi/ Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan	Frekuensi sosialisasi/ penyuluhan ketertiban LLA yang diadakan	77 kali	96 kali	19.7	100 kali	35.58	102 kali	191.96	104 kali	132.609	6 jenis	208.970.4	2 paket	229.8	108 kali	146.2	Bidang Perhubungan	Kab. Jembrana
Meningkatkan keamanan lalu lintas	Terlaksananya kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum	Frekuensi kegiatan lomba awak kendaraan umum teladan (AKUT)	1	07	1	07	01	17	15	Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan	Frekuensi kegiatan lomba awak kendaraan umum teladan (AKUT)	1 kali	1 kali	1.5	1 kali	11	1 kali	9.68	1 kali	34.638	1 kali	10.062.5	1 kali	11	1 kali	38.19	Bidang Perhubungan	Kab. Jembrana
			1	07	1	07	01	17	16	Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	Jumlah pelaksanaan kegiatan forum lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten jembrana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 kali	43	-	-			
Meningkatkan keamanan lalu lintas	Terlaksananya Peringatan Hari Perhubungan Nasional di Kab. Jembrana	Jumlah lomba yang dilaksanakan dalam rangkaian Peringatan Harhubnas	1	07	1	07	01	17	18	Kegiatan Peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas)	Jumlah lomba yang dilaksanakan dalam rangkaian Peringatan Harhubnas	-	-	-	-	-	1 kali	1975	1 kali	9.85	1 paket	17.872.5	1 kali	19.6	1 kali	11.92	Bidang Perhubungan	Kab. Jembrana

Meningkatnya Pelayanan angkutan penumpang	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana yang di laksanakan.	1	07	1	07	01	18	Prgram pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana yang di laksanakan.	-	-	-	-	-	12 unit	813.98	13 unit	192	457.985	90%	95,000	14 unit	232.32	Bidang Perhubungan	Kab. Jembrana		
Meningkatnya Pelayanan angkutan penumpang	Meningkatnya jumlah terminal	Jumlah terminal yang di bangun	1	07	1	07	01	18	Pembangunan gedung terminal	Jumlah terminal yang di bangun	-	-	-	-	-	-	-	-	2 paket	265.735	-	-	-	-	Bidang Perhubungan	Kab. Jembrana		
																				1 unit terminal penumpang	30,000							
																					1 unit terminal barang	65,000						
Meningkatnya Pelayanan angkutan penumpang	Meningkatnya pengadaan halte bus, taxi gedung terminal	Jumlah Halte bus, Taxi gedung terminal yang di bangun	1	07	1	07	01	18	Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal	Jumlah Halte bus, Taxi gedung terminal yang di bangun	-	-	-	-	-	12 unit	813.98	13 unit	192	4 unit	192.25	-	14 unit	232	Bidang Perhubungan	Kab. Jembrana		
Meningkatkan pelayanan di bidang perhubungan	Meningkatnya sarana dan prasarana lalu lintas	Persentase pemasangan rambu-rambu	1	07	1	07	01	19	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase pemasangan rambu-rambu	-	40%	74.68	50%	91.48	60%	294.38	70%	587.337.5	576	90%	1,219,821	80%	434.41	Bidang Perhubungan	Kab. Jembrana		
Meningkatkan keamanan lalu lintas	Meningkatnya pengadaan rambu-rambu lalu lintas dari 54 unit pada tahun 2011 menjadi 120 unit pada tahun 2016	Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang diadakan	1	07	1	07	01	19	Kegiatan Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang diadakan	891 unit	54 unit	40.1	102 unit	56.6	107 unit	210.38	210 buah	201.851.5	2 jenis	185	511 buah	385.321	120 unit	48.4	Bidang Perhubungan	Kab. Jembrana	
Meningkatkan keamanan lalu lintas	Meningkatnya pengadaan marka jalan dari 300m2 pada tahun 2011 menjadi 1.755m2 pada tahun 2016	Panjang marka jalan yang diadakan	1	07	1	07	01	19	Kegiatan Pengadaan Marka Jalan	Panjang marka jalan yang diadakan	1.850 m2	300m ²	34.58	325m ²	34.58	350m ²	84	740 m2	103.6	1400 m2	196	1500 m2	210	400m ²	83.01	Bidang Perhubungan	Kab. Jembrana	
Meningkatkan keamanan lalu lintas	Terlaksananya pengadaan pagar pengaman jalan sepanjang 120m	Panjang pagar pengaman jalan yang diadakan	1	07	1	07	01	19	Kegiatan Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	Jumlah pagar pengaman jalan yang diadakan	-	-	-	-	-	-	152 m	197.6	-	-	-	-	-	-	Bidang Perhubungan	Kab. Jembrana		
Meningkatkan keamanan lalu lintas	terlaksananya pengendali isyarat yang diadakan	jumlah pengendali isyarat yang diadakan	1	07	1	07	01	19	Pengadaan pengendali Isyarat Lalu lintas	jumlah pengendali isyarat yang diadakan	-	-	-	-	-	-	4 unit	84.286	6 unit	180	7 unit	210	-	-	Bidang Perhubungan	Kab. Jembrana		
Revisi 3 Kabupaten Jembrana	Penstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Jembrana	jumlah fasilitas pengawasan yang diadakan							Peningkatan kebutuhan pemeliharaan dan pengawasan fasilitas lalu lintas	jumlah fasilitas pengawasan yang diadakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 unit	15	1 unit	200	-	-	Bidang Perhubungan	Kab. Jembrana	

Meningkatnya pemeliharaan dan pengawasan fasilitas lalu lintas	Terlaksananya pengawasan dan pemeliharaan lalu lintas	Jumlah fasilitas pengawasan yang diadakan	1	07	1	07	01	19	05	Peningkatan kebutuhan pemeliharaan dan pengawasan fasilitas lalu lintas	Jumlah fasilitas pengawasan yang diadakan	-	-	-	-	-	-	-	-	12 unit	15	1 unit	200	-	-	Bidang Perhubungan	Kab. Jembrana	
			1	07	1	07	01	19	06	Pengadaan pagar pengaman lalu lintas	Panjang pagar pengaman jalan yang diadakan	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	165 m2	214.5	-	-			
Meningkatkan pelayanan di bidang perhubungan	Meningkatnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor	Jumlah uji kir angkutan umum	1	07	1	07	01	20	06	Program Peningkatan Kelangkaan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Meningkatnya kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	6,007	-	-	250	7,995	192	-	-	-	90%	600	9,674	453.00	-	Bidang Perhubungan	Kab. Jembrana	
Meningkatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor	Terlaksananya pengaspalan pintu keluar masuk pengujian kendaraan sebanyak 1 paket	Jumlah pengaspalan jalan pintu keluar masuk pengujian yang diadakan	1	07	1	07	01	20	01	Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah pengaspalan jalan pintu keluar masuk pengujian yang diadakan	-	-	1 paket	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Perhubungan	Kab. Jembrana	
Meningkatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor	Meningkatnya pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor dari 0 unit pada tahun 2011 menjadi 6 unit pada tahun 2016	Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor yang diadakan	1	07	1	07	01	20	02	Kegiatan Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor yang diadakan	-	-	2 unit	192	0	0	-	-	1 jenis	600	6 unit	453	-	Bidang Perhubungan	Kab. Jembrana		
Meningkatkan kelaikan pengoperasian kendaraan	Meningkatnya survey kelaikan pengoperasian kendaraan dari 1 jenis di tahun 2013 menjadi 3 jenis tahun 2016	Jumlah survey yang diadakan	1	07	1	07	01	20	03	Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor	Jumlah survey yang diadakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Perhubungan	Kab. Jembrana	
Meningkatkan pengelolaan komunikasi dan informasi	Meningkatnya pengembangan komunikasi, informasi dan media massa serta kualitas SDM	Jumlah pameran/expo	1	25	1	07	01	15	06	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Terlaksananya pameran/expo dim rangka pengembangan komunikasi informasi	3 kali	2 kali	734.89	2 kali	612.42	2 kali	1630.73	2 kali	2.865.711.4	-	1.604.766	90%	1,947,919	10 kali	3026.61	Bidang Komunikasi dan Informatika	Kab. Jembrana
Meningkatkan pelayanan komunikasi informasi	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi sebanyak 2 paket	Jumlah layanan komunikasi, informasi dan media massa yang dipelihara	1	25	1	07	01	15	02	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Jumlah layanan komunikasi, informasi dan media massa yang dipelihara	2 paket	2 paket	325.17	2 paket	342.69	2 paket	608.71	2 paket	790.714.4	2 paket	978.966	1 jaringan LAN dan 1 buah Website	1,174,759	2 paket	955.55	Bidang Komunikasi dan Informatika	Kab. Jembrana
Meningkatkan pelayanan komunikasi informasi	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi sebanyak 2 paket	Jumlah audit standar mutu organisasi yang dilaksanakan	1	25	1	07	01	15	03	Kegiatan Pembinaan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	Jumlah audit standar mutu organisasi yang dilaksanakan	2 paket	2 paket	40	2 paket	15	2 paket	15	2 paket	30	1 kali	19	2 kali	45	2 paket	36.3	Bidang Komunikasi dan Informatika	Kab. Jembrana

Indikasi Program / Kegiatan Prioritas dan Kerangka Pendanaan 2011 - 2016

No	URUSAN	KERANGKA REGULASI	KERANGKA PENGANGGARAN	INDIKATIF ANGGARAN (Rp 000.000,00)					
				TAHUN (Termasuk peralihan tahun 2016)					
				2011	2012	2013	2014	2015	2016
	1. URUSAN WAJIB								
1.7	PERHUBUNGAN								
1.7.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			727.42	641.52	720.95	718.95	784.06	850.11
1			Penyediaan jasa surat penyurat	6.10	6.20	5.60	5.60	6.50	6.60
2			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	66.00	-	-	-	-	-
3			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	88.22	88.22	210.92	202.806	223.09	245.40
4			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	6.35	6.35	30.85	33.70	37.07	40.78
5			Penyediaan alat tulis kantor	71.33	71.33	99.66	98.040	107.84	118.63
6			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	21.67	21.67	23.97	23.974	24.00	26.40
7			Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	-	-	21.00	15.50	17.05	18.76
8			Penyediaan bahan logistik kantor	171.34	171.34	-	-	-	-
9			Penyediaan makanan dan minuman	3.99	3.99	15.22	18.67	20.54	22.59
10			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	292.42	272.42	293.01	297.558	322.56	343.01
11			Penyediaan jasa tenaga administrasi	-	-	-	-	-	-
12			Penyediaan Upakara / Upacara keagamaan	-	-	20.716	23.10	25.41	27.95
1.7.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			-	255.00	75.40	111.20	303.74	320.02
1			Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		100.00	-	17.00	66.00	66.00
2			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	80.00	-	-	-	-
3			Pengadaan peralatan gedung kantor	-	50.00	-	-	75.00	75.00
4			Pengadaan Mebeleur		25.00	-	19.75	80.85	88.94
5			Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas / Operasional	-	-	72.00	72.00	79.20	87.12
6			Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan Dinas/operasional	-	-	-	-	-	-
7			Pemeliharaan Rutin/ berkala Perlengkapan gedung kantor	-	-	3.40	2.45	2.69	2.96
1.7.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			-	25.00	14.00	14.00	15.40	16.94
1			Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	-	25.00	-	-	-	-
2			Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	-	-	14.00	14.00	15.40	16.94
1.7.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			-	50.12	-	-	50.00	50.00
1			Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	50.12	-	-	50.00	50.00
1.7.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			8.30	8.40	11.83	11.83	8.40	8.40
1			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8.30	8.40	11.83	11.83	8.40	8.40
1.7.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan			244.31	-	-	225.00	33.00	50.95
1			Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat		-	-	-	33.00	35.00

2			Monitoring, evaluasi dan pelaporan		-	-	-	-	-
3			Peningkatan sarana prasarana lalu lintas	244.31	-	-	-	-	15.95
4			Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	-	-	-	225.00	-	-
1.7.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ			104.60	89.60	174.60	117.25	386.45	340.46
1		-	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	-	-	-	-	-	-
2			Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor	-	-	-	20.94	61.00	-
3		-	Rehabilitasi/pemeliharaan Terminal/Pelabuhan	-	-	-	-	220.00	225.00
4		-	Rehabilitasi/pemeliharaan halte	15.00	-	30.00	10.00	10.50	11.03
5		-	Rehabilitasi/pemeliharaan traffic light dan warning light	89.60	89.60	144.60	86.31	94.95	104.44
1.7.17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan			459.81	422.40	982.07	902.42	762.32	796.37
1			Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	-	-	-	-	-	-
2		-	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	13.31	11.00	27.45	26.27	28.89	31.78
3		-	Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal	224.73	247.21	358.91	407.89	252.00	255.00
4		-	Kegiatan penciptaan layanan cepat, tepat, murah dan mudah	88.57	-	192.64	156.64	172.30	189.53
5		-	Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan	-	5.61	28.00	9.71	10.68	11.75
6		-	Fasilitas perijinan di bidang perhubungan	112.00	112.00	153.70	124.82	112.00	112.00
7		-	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	19.70	35.58	191.96	132.61	139.24	146.20
8		-	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraan angkutan umum teladan	1.50	11.00	9.68	34.64	36.37	38.19
9		-	Peringatan Hari Perhubungan Nasional (HARHUBNAS)	-	-	19.75	9.85	10.84	11.92
1.7.18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan			-	-	813.98	192.00	60,211.20	232.32
1			Pembangunan gedung terminal	-	-	-	-	60,000	-
2			Pembangunan Halte Bus, Taxi gedung terminal	-	-	813.98	192	211	232
1.7.19	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas			74.68	91.18	294.38	108.60	119.46	131.41
1		-	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	40.10	56.60	210.38	40.00	44.00	48.40
2		-	Pengadaan marka jalan	34.58	34.58	84.00	68.60	75.46	83.01
3		-	Pengadaan pagar pengaman jalan	-	-	-	-	-	-
4			Pengadaan Pengendali Isyarat Lalu Lintas	-	-	-	-	-	-
5			Peningkatan Kebutuhan, Pemeliharaan dan pengawasan lalulintas	-	-	-	-	-	-
1.7.20	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor			-	250.00	192.00	410.89	431.43	453.00

1			Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	-	250.00	-	-	-	-
2			Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	-	-	192.00	410.89	431.43	453.00
3			Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor		-	-	-	-	-
1.25	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
1.25.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			734.89	612.42	1,630.73	2,657.20	3,015.20	3,026.61
1		v	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	325.17	342.69	608.71	789.71	868.69	955.55
2		-	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	40.00	15.00	15.00	30.00	33.00	36.30
3		-	Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi	-	175.00	-	-	-	-
4		-	Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi	260.00	-	-	-	180.00	-
5			Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	-	-	177.52	83.00	91.30	100.43
6		-	Sosialisasi Pembangunan dan Kebijakan Pemerintah Daerah	109.72	79.73	829.51	1,754.49	1,842.21	1,934.33
1.25.16	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi			-	-	25.00	25.00	26.25	27.56
1			Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	-	-	25.00	25.00	26.25	27.56
1.25.17	Program Fasilitasi Peningkatan SDM di Bidang Komunikasi dan Informasi			-	-	-	-	-	-
1		-	Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan Informasi	-	-	-	-	-	-
1.25.18	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa			858.17	766.54	80.64	117.83	844.62	872.58
1		v	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	139.30	100.00	80.64	117.83	129.62	142.58
2		-	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	718.87	666.54	-	-	715.00	730.00
3		-	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	-	-	-	-	-	-
GENERAL TOTAL				3,212.18	3,212.18	5,015.57	5,612.17	66,991.52	7,176.73

BAB VI

INDIKATOR KINERJA

6.1 INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja merupakan uraian ringkas yang menggambarkan tentang suatu kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran. Dari indikator kinerja tersebut akan terlihat dengan jelas kinerja yang ingin dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran.

Indikator kinerja harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Spesifik dan jelas, sehingga dapat dipahami dan tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi;
2. Dapat diukur secara obyektif, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif;
3. Relevan, harus mencakup aspek-aspek yang bersangkutan pautan (dibutuhkan);
4. Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan *input(s)*, *output(s)*, dan *outcome(s)*;
5. Harus cukup fleksibel dan sensitif terhadap perubahan/penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan;
6. Efektif, data/informasi yang diperlukan dapat dikumpulkan dan diolah dengan biaya yang ada.

Indikator kinerja pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 6.1
INDIKATOR KINERJA SKPD
MENGACU TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2016)
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Urusan Perhubungan							
1	Jumlah perlengkapan pos yang diadakan	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket
2	Jumlah kendaraan yang dioperasikan	1 unit	1 unit	-	-	-	-	-
3	Jumlah kendaraan yang dipelihara	21 unit	21 unit	21 unit	21 unit	21 unit	21 unit	21 unit
4	Jumlah peralatan yang dipelihara	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket
5	Jumlah alat tulis kantor yang diadakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket
6	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket
7	Jumlah bahan logistic (BBM, alat listrik dan banten) yang diadakan	2 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket
8	Jumlah makan dan minum yang disediakan untuk mendukung kegiatan rapat	1920 kotak	1330 kotak	1330 kotak	1330 kotak	1330 kotak	1330 kotak	6650 kotak
9	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan dalam 1 tahun	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket
10	Jumlah tenaga administrasi yang diadakan	-	-	6 orang				
11	Jumlah kendaraan dinas yang dioperasikan	-	-	2 unit	1 unit	1 unit	1 unit	2 unit
12	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	-	-	4 jenis	-	-	-	4 jenis
13	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	-	-	3 jenis	-	-	2 jenis	5 jenis
14	Jumlah mebeleur yang diadakan	-	-	5 jenis	-	-	-	5 jenis

15	Jumlah pakaian kerja yang diadakan	-	-	102 stel	-	-	-	-
16	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal yang diadakan	-	-	8 kali	8 kali	8 kali	8 kali	24 kali
17	Jumlah laporan yang terselesaikan	2 item	2 item	2 item	2 item	2 item	2 item	2 item
18	Jumlah pengguna terminal dalam 1 tahun	-	-	-	2 juta orang/brg/kend	2 juta orang/brg/kend	2 juta orang/brg/kend	6 juta orang/brg/kend
19	Jumlah pelaporan yang dihasilkan	-	-	-	1 item	1 item	1 item	1 item
20	Jumlah sarana prasarana lalu lintas yang diadakan	-	4 jenis	-	-	1 unit	-	5 unit
21	Persentase wajib uji kendaraan yang melakukan pengujian berkala	-	-	-	96%	98%	100%	100%
22	Jumlah prasarana balai pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara	1 paket	-	-	1 paket	-	1 paket	-
23	Jumlah terminal yang dipelihara	3 buah	-	-	3 buah	3 buah	3 buah	3 buah
24	Jumlah halte yang dipelihara	47 unit	47 unit	-	47 unit	47 unit	47 unit	47 unit
25	Jumlah <i>traffic light</i> , <i>warning light</i> dan <i>counter down</i> yang dipelihara	29 buah	29 buah	29 buah	31 buah	31 buah	33 buah	33 buah
26	Jumlah sarana pendukung uji kelayakan yang diadakan	-	-	-	-	2 jenis	2 jenis	2 jenis
27	Jumlah kegiatan WTN yang dilaksanakan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
28	Jumlah tenaga kebersihan dan keamanan	13 orang	17 orang	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang
29	Jumlah kendaraan angkutan umum yang dioperasikan	6 unit	2 unit	-	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
30	Jumlah alat-alat survey yang diadakan	1 paket	-	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket
31	Jumlah bahan baku dan blangko penunjang kegiatan perijinan yang diadakan	15 jenis	15 jenis	15 jenis	15 jenis	15 jenis	15 jenis	15 jenis
32	Frekuensi sosialisasi/penyuluhan ketertiban LLA yang diadakan	96 kali	96 kali	100 kali	102 kali	104 kali	108 kali	108 kali
33	Frekuensi kegiatan lomba awak kendaraan umum teladan (AKUT)	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
34	Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang diadakan	891 unit	54 unit	102 unit	107 unit	117 unit	120 unit	500 unit

35	Panjang marka jalan yang diadakan	1.850 m ²	300 m ²	325 m ²	350 m ²	380 m ²	400 m ²	1755 m ²
36	Panjang pagar pengaman jalan yang diadakan	-	-	-	40 m	40 m	40 m	160 m
37	Jumlah pengaspalan jalan pintu keluar masuk di pengujian yang diadakan	-	-	1 paket	-	-	-	1 paket
38	Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor yang diadakan	-	-	-	-	3 unit	3 unit	6 unit
39	Jumlah survey yang dilaksanakan	-	-	-	1 jenis	1 jenis	1 jenis	3 jenis
	<u>Urusan Komunikasi dan Informatika</u>							
1	Jumlah layanan komunikasi, informasi dan media massa yang dipelihara	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket
2	Jumlah audit standar mutu organisasi yang dilaksanakan	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	10 paket
3	Jumlah peralatan studio dan komunikasi yang diadakan	-	-	6 paket				
4	Jumlah sistem informasi dan komunikasi yang dikembangkan	-	1 paket	-	1 paket	-	1 paket	1 paket
5	Jumlah sosialisasi informasi pembangunan daerah yang dilaksanakan	100%	10 paket	15 paket	20 paket	25 paket	30 paket	100 paket
6	Jumlah pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	-	-	-	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket
7	Jumlah pelatihan SDM bidang komunikasi dan informasi	-	-	-	1 kali	1 kali	1 kali	3 kali
8	Jumlah penyebaran informasi pembangunan daerah	2 kali	62 kali	122 kali	182 kali	242 kali	302 kali	910 kali
9	Jumlah penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	45.596 kali	30.446 kali	33.490 kali	36.839 kali	40.520 kali	44.574 kali	185.869 kali
10	Jumlah penyebaran informasi yang bersifat penyuluhan yang diadakan	-	-	-	1 paket	1 paket	1 paket	3 paket

TABEL 6.2

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN

NO.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke -				
				Thn 1	Thn 2	Thn 3	Thn 4	Thn 5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya perlengkapan pos sebanyak 3 paket	Jumlah perlengkapan pos yang diadakan	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket
2	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya kendaraan yang dioperasikan sebanyak 1 unit	Jumlah kendaraan yang dioperasikan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
3	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya kendaraan yang dipelihara sebanyak 21 unit	Jumlah kendaraan yang dipelihara	21 unit	21 unit	21 unit	21 unit	21 unit
4	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran	Terpeliharanya peralatan untuk operasional kantor sebanyak 1 paket	Jumlah peralatan yang dipelihara	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket
5	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya alat tulis kantor sebanyak 1 paket	Jumlah alat tulis kantor yang diadakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket
6	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk operasional kantor sebanyak 2 paket	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket
7	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya bahan logistic kantor yang diadakan sebanyak 3 paket	Jumlah bahan logistic (BBM, alat listrik dan banten) yang diadakan	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket
8	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya makan dan minum untuk kegiatan rapat sebanyak 1330 kotak	Jumlah makan dan minum yang disediakan untuk mendukung kegiatan rapat	1330 kotak	1330 kotak	1330 kotak	1330 kotak	1330 kotak
9	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran	Terlaksananya perjalanan dinas dalam 1 tahun sebanyak 2 paket	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan dalam 1 tahun	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket
10	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya tenaga administrasi untuk operasional sebanyak 6 orang	Jumlah tenaga administrasi yang diadakan	-	6 orang	6 orang	6 orang	6 orang
11	Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya kendaraan dinas yang dioperasikan sebanyak 2 unit	Jumlah kendaraan dinas yang dioperasikan	-	2 unit	1 unit	1 unit	1 unit

12	Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya perlengkapan gedung kantor sebanyak 4 jenis	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	-	4 jenis	-	-	-
13	Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur dari 3 jenis pada tahun 2012 menjadi 5 jenis pada tahun 2016	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	-	3 jenis	-	-	2 jenis
14	Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya mebeleur kantor sebanyak 5 jenis	Jumlah mebeleur yang diadakan	-	5 jenis	-	-	-
15	Meningkatkan disiplin aparatur	Tersedianya pakaian kerja sebanyak 102 stel	Jumlah pakaian kerja yang diadakan	-	102 stel	-	-	-
16	Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal sebanyak 8 kali	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal yang diadakan	-	8 kali	8 kali	8 kali	8 kali
17	Meningkatkan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terselesaikannya laporan capaian kinerja sebanyak 2 item	Jumlah laporan yang terselesaikan	2 item	2 item	2 item	2 item	2 item
18	Meningkatkan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Meningkatnya jumlah pengguna terminal dalam satu tahun dari 2 juta org/brg/kend pada tahun 2013 menjadi 6 juta org/brg/kend di tahun 2016	Jumlah pengguna terminal dalam 1 tahun	-	-	2 juta org/brg/kend	2 juta org/brg/kend	2 juta org/brg/kend
19	Meningkatkan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Terlaksananya monitoring dan pelaporan sebanyak 1 item	Jumlah pelaporan yang dihasilkan	-	-	1 item	1 item	1 item
20	Meningkatkan sosialisasi keamanan lalu lintas	Meningkatnya sarana prasarana lalu lintas dari 4 jenis pada tahun 2011 menjadi 5 jenis pada tahun 2016	Jumlah sarana prasarana lalu lintas	4 unit	-	-	1 unit	-
21	Meningkatkan keamanan kendaraan bermotor	Meningkatnya rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor dari 96% pada tahun 2013 menjadi 100% pada tahun 2016	Persentase wajib uji kendaraan yang melakukan pengujian berkala	-	-	96%	98%	100%

22	Meningkatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor	Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor sebanyak 1 paket	Jumlah prasarana balai pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara	-	-	1 paket	-	1 paket
23	Meningkatkan pelayanan lalu lintas	Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan sebanyak 3 buah	Jumlah terminal yang dipelihara	-	-	3 buah	3 buah	3 buah
24	Meningkatkan pelayanan lalu lintas	Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan halte sebanyak 47 unit	Jumlah halte yang dipelihara	47 unit	-	47 unit	47 unit	47 unit
25	Meningkatkan keamanan lalu lintas	Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan traffic light dan warning light sebanyak 29 unit pada tahun 2011 menjadi 33 unit	Jumlah traffic light, warning light dan counter down yang dipelihara	29 unit	29 unit	31 unit	31 unit	33 unit
26	Meningkatkan pelayanan angkutan	Tersedianya sarana pendukung uji kelayakan sebanyak 2 jenis	Jumlah sarana pendukung uji kelayakan yang diadakan	-	-	-	2 jenis	2 jenis
27	Meningkatkan keamanan lalu lintas	Terlaksananya kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya sebanyak 1 kali	Jumlah kegiatan WTN yang dilaksanakan	1 kali				
28	Meningkatkan kenyamanan berlalu lintas	Terlaksananya pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal sebanyak 17 orang pada tahun 2011 menjadi 20 orang pada tahun 2016	Jumlah tenaga kebersihan dan keamanan	17 orang	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang
29	Meningkatkan pelayanan transportasi	Meningkatnya pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah sebanyak 2 unit	Jumlah kendaraan angkutan umum yang dioperasikan	2 unit	-	2 unit	2 unit	2 unit
30	Meningkatkan keamanan lalu lintas	Terlaksananya pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan sebanyak 1 paket	Jumlah alat-alat survey yang diadakan	-	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket
31	Meningkatkan pelayanan perijinan	Terlaksananya fasilitasi perijinan di bidang perhubungan sebanyak 15 jenis	Jumlah bahan baku dan blangko penunjang kegiatan perijinan yang diadakan	15 jenis				

32	Meningkatkan keamanan lalu lintas	Meningkatnya sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan dari 96 kali pada tahun 2011 menjadi 108 kali pada tahun 2016	Frekuensi sosialisasi penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	96 kali	100 kali	102 kali	104 kali	108 kali
33	Meningkatkan keamanan lalu lintas	Terlaksananya kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/ awak kendaraan angkutan umum teladan sebanyak 1 kali	Frekuensi kegiatan lomba awak kendaraan umum teladan (AKUT)	1 kali				
34	Meningkatkan keamanan lalu lintas	Meningkatnya pengadaan rambu-rambu lalu lintas dari 54 unit pada tahun 2011 menjadi 500 unit pada tahun 2016	Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang diadakan	54 unit	102 unit	107 unit	117 unit	120 unit
35	Meningkatkan keamanan lalu lintas	Meningkatnya pengadaan marka jalan dari 300 m ² pada tahun 2011 menjadi 1.755 m ² pada tahun 2016	Panjang marka jalan yang diadakan	300 m ²	325 m ²	350 m ²	380 m ²	400 m ²
36	Meningkatkan keamanan lalu lintas	Terlaksananya pengadaan pagar pengaman jalan dari 40m pada tahun 2011 menjadi 120m pada tahun 2016	Panjang pagar pengaman jalan yang diadakan	-	-	40m	40m	40m
37	Meningkatkan kelaikan pengoperasian kendaraan	Terlaksananya pengaspalan pintu keluar masuk pengujian kendaraan sebanyak 1 paket	Jumlah pengaspalan jalan pintu keluar masuk pengujian yang diadakan	-	1 paket	-	-	-
38	Meningkatkan kelaikan pengoperasian kendaraan	Meningkatnya pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor dari 0 unit pada tahun 2011 menjadi 6 unit pada tahun 2016	Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor yang diadakan	-	-	-	3 unit	3 unit
39	Meningkatkan kelaikan pengoperasian kendaraan	Meningkatnya survey kelaikan pengoperasian kendaraan dari 1 jenis di tahun 2013 menjadi 3 jenis tahun 2016	Jumlah survey yang diadakan	-	-	1 jenis	1 jenis	1 jenis
40	Meningkatkan pelayanan komunikasi informasi	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi sebanyak 2 paket	Jumlah layanan komunikasi, informasi dan media massa yang dipelihara	2 paket				

41	Meningkatkan pelayanan komunikasi informasi	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi sebanyak 2 paket	Jumlah audit standar mutu organisasi yang dilaksanakan	2 paket				
42	Meningkatkan pelayanan komunikasi informasi	Terpenuhinya kebutuhan alat studio dan komunikasi sebanyak 6 paket	Jumlah peralatan studio dan komunikasi yang diadakan	-	6 paket	6 paket	6 paket	6 paket
43	Meningkatkan pelayanan komunikasi informasi	Terlaksananya pengkajian dan pengembangan sistem informasi sebanyak 1 paket	Jumlah sistem informasi dan komunikasi yang dikembangkan	1 paket	-	1 paket	-	1 paket
44	Meningkatkan pelayanan komunikasi informasi	Meningkatnya kegiatan sosialisasi pembangunan dan kebijakan pemerintah daerah dari 10 paket pada tahun 2011 menjadi 100 paket pada tahun 2016	Jumlah sosialisasi informasi pembangunan daerah yang dilaksanakan	10 paket	15 paket	20 paket	25 paket	30 paket
45	Meningkatkan pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	Meningkatnya pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi dari 1 paket pada tahun 2013 menjadi 3 paket pada tahun 2016	Jumlah pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	-	-	1 paket	1 paket	1 paket
46	Meningkatkan pelayanan komunikasi informasi	Terlaksananya pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi dari 1 kali pada tahun 2013 menjadi 3 kali pada tahun 2016	Jumlah pelatihan SDM bidang komunikasi dan informasi	-	-	1 kali	1 kali	1 kali
47	Meningkatkan pelayanan komunikasi informasi	Meningkatnya penyebarluasan informasi pembangunan daerah dari 62 kali pada tahun 2011 menjadi 302 kali pada tahun 2016	Jumlah penyebarluasan informasi pembangunan daerah	62 kali	122 kali	182 kali	242 kali	302 kali
48	Meningkatkan pelayanan komunikasi informasi	Meningkatnya penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dari 30.446 kali pada tahun 2011 menjadi 44.574 kali pada tahun 2015	Jumlah penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	30.446 kali	33.490 kali	36.839 kali	40.522 kali	44.574 kali

49	Meningkatkan pelayanan informasi	Meningkatnya penyebaran informasi yang bersifat penyuluhan dari 1 paket pada tahun 2013 menjadi 3 paket pada tahun 2016	Jumlah penyebaran informasi yang bersifat penyuluhan yang diadakan	-	-	1 paket	1 paket	1 paket
----	----------------------------------	---	--	---	---	---------	---------	---------

BAB VII

PENUTUP

Renstra merupakan perencanaan strategis yang dibuat sebagai pedoman bagi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Karena adanya perubahan dalam struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah, sesuai dengan Perda Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 maka dipandang perlu untuk memperbaharui Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam perencanaan dinas di tahun-tahun mendatang. Perencanaan ini akan dijadikan dasar dalam pencapaian visi dan misi organisasi yang nantinya diharapkan akan mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Negara, 5 Juni 2013

**Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi
Dan Informatika Kab. Jembrana**



I Gusti Ngurah Bagus Putra Riyadi,SH,M.Si
NIP.19640506-199403 1 010